



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAMBI**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025**

Jl. M. Yusuf Singedikane No. 1 Telanaipura Jambi

Telp. (0741) 62596, Fax (0741) 60561 Email : disbunprovjambi@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKj IP ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada outcome, relevansi, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) Tahun 2024 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Jambi, 17 Maret 2025
PLt. KEPALA DINAS,



RAKHMAT DARMAWAN. SPt
Pembina.
NIP. 19710831199803 1003

RINGKASAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam dokumen Renstra OPD.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024 tetap mengacu kepada Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1291/KEP.GUB/SETDA.ORG-3.3/2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran #1 : Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dengan indikator kinerjanya yakni persentase peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah untuk kesejahteraan pekebun dengan capaian kinerja sebesar **100,86 %**. Sasaran ini dicapai melalui program Penyediaan dan pengembangan Sarana pertanian, dan program Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian yang operasionalisasinya didukung oleh 4 (empat) kegiatan. Nilai Capaian Kinerja Sasaran 1 ini dapat dikategorikan **Hijau Tua**.

Sasaran #2: Meningkatnya Pendapatan petani, buruh tani, dan pekerja lain dengan indikator kinerjanya yakni persentase peningkatan NTUP-Perkebunan. Sasaran ini dicapai melalui program Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian, Perizinan Usaha Pertanian dan program Penyuluhan pertanian dengan capaian kinerja sebesar **67,81 %**. yang operasionalisasinya didukung oleh 5 (lima) kegiatan. Nilai Capaian Kinerja Sasaran 2 ini dapat dikategorikan **Hijau Tua**.

Sasaran #3 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan indikator kinerjanya yakni Persentase peningkatan kualitas pelayanan internal OPD dengan capaian kinerja sebesar **95,65 %**. Sasaran

ini dicapai melalui program Penunjang urusan pemerintahan daerah yang operasionalisasinya didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan. Nilai Capaian Kinerja Sasaran 1 ini dapat dikategorikan **Hijau Tua**.

Dari analisis Capaian kinerja Sasaran Strategis dinas Perkebunan Provinsi Jambi **tahun 2024**, diperoleh nilai sebesar **92,93 %** atau dapat dikategorikan **sangat baik** dengan Kode **Hijau Tua**. Dapat dikategorikan bahwa Capaian kinerja Sasaran Strategis dinas Perkebunan **Tahun 2024** kategori masih **sangat Baik**, dan bila dibandingkan **tahun 2023** tercatat **100,64 %**, maka mengalami **penurunan sebesar - 7,71 %**.

Capaian kinerja Program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2024 rata-rata sebesar **85,18 %**, yang meliputi capaian serapan dana sebesar 80,13 % dan capaian kinerja realisasi fisik sebesar 90,22 % dengan tingkat efisiensi anggaran secara umum sebesar **0,78 %**. Angka efisiensi ini lebih baik bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 0,93 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi.....	2
1.2 Tugas dan Fungsi.....	4
1.3 Isu-Isu Strategis	5
1.4 Keadaan Pegawai	8
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	11
1.6 Keuangan.....	12
1.7 Sistematisasi LKj IP	13
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	 15
2.1 Perencanaan Strategis.....	15
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	16
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	17
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan	19
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024	21
2.3.1 Target Belanja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.....	22
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sarana Strategis	22
2.4 Instrumen Pendukung.....	23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	25
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jambi	25
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	30
3.4 Realisasi Anggaran	42
 BAB IV PENUTUP	 50

LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi

Lampiran 2 Matrik Renstra 2021-2026 (Renstra-Perubahan 2021-2026)

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 4 Tanggapan/Tindakan Lanjut Evaluasi LKj- IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5 Penghargaan yang Pernah Diterima

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Tahun 2024.....	12
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2126.....	16
Tabel 2.1.2 Sasaran Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	18
Tabel 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	19
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
Tabel 2.3.1 Target Belanja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2024.....	22
Tabel 2.3.2 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.....	23
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel 3.2 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jambi	26
Tabel 3.2.2 Capaian kinerja Dinas Perkebunan Prov.Jbi Tahun 2024.....	28
Tabel.3.2.3. Realisasi kinerja serta Capaian kinerja tahun 2024 dengan Tahun Lalu 2023 beberapa tahun terakhir	29
Tabel 3.2.4.Realisasi kinerja sampai tahun ini dengan Target JM Renstra.....	30
Tabel.3.3 Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024.....	30
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024	30
Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024	40
Tabel 3.6 Analisis Efisiensi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	3
Gambar 1.2 Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024.....	10
Gambar 1.3 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024.....	10
Gambar 1.4 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024.....	11

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pasal 13 disebutkan bahwa pimpinan SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan, selanjutnya pada pasal 21 disebutkan bahwa Lkj-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024 tetap mengacu kepada Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1291/KEP.GUB/SETDA.ORG-3.3/2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Maksud dan tujuan penyusunan Lkj ini adalah merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
2. Mendorong Dinas Perkebunan Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perkebunan Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, dan Peraturan Gubernur Jambi No.17 Tahun 2018, No.18 Tahun 2018 dan No.19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, yang terdiri dari :

1. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP).
2. Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (BPTP).
3. Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan (BPPBTP).

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi



Pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 awalnya menggunakan struktur Perda Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 10 Januari 2024 tentang APBD TA. 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 26), kemudian setelah adanya pergeseran Anggaran melalui mekanisme Perubahan APBD TA.2024 tanggal 15 Oktober 2024, maka pelaksanaan anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menggunakan Perda Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 14 Nopember 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 37 Tahun 2024);.

1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 43 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pertanian untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan;
- 3) Pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan suervisi di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana Sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan perlindungan perkebunan, pengolahan, standardisasi dan pemasaran hasil perkebunan;
- 5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perkebunan;

- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD yang terkait;
- 7) Penyampaian laporan sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui sekretaris daerah; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, dan serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, dan Peraturan Gubernur Jambi No.17 Tahun 2018, No.18 Tahun 2018 dan No.19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, baik internal maupun eksternal.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup kualitas sumberdaya manusia, kemampuan anggaran dan kebijakan Pemerintah. Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah tuntutan masyarakat, dampak dari bencana Nasional, dan globalisasi pasar dunia yang selalu berubah.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perkebunan selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki serta mendukung percepatan pelaksanaan program-program Nasional.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang

melingkupi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi , antara lain sebagai berikut :

a. Faktor internal

❖ **Kekuatan (*strenghts*) :**

1. Tersedianya Sistem sarana dan prasarana (bidang perbenihan dan produksi, pengembangan dan penyuluhan, PSPP, PSPHP, UPTD-BPTP, UPTD-BPSBTP, UPTD-BPPBTP);
2. Tersedianya Sumber daya Manusia (Penyuluh, PPNS, PBT, PMHP, Pengawas Pesticida, Petugas PUP, Brigade Karhutlah, tenaga teknis Pemetaan, tenaga Perencana, Fasda);
3. Tersedianya Laboratorium benih, OPT, dan APH, serta Lahan kebun dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
4. Tersedianya Regulasi tentang Perkebunan berupa Peraturan, Norma, Standar Operasional, dan Perda Provinsi Jambi No.19 tahun 2020 tentang Tata Niaga Perkebunan Provinsi Jambi;

❖ **Kelemahan (*weakness*) :**

1. Belum tersedianya data akurat terkait Pemetaan Infrastruktur dan Sarana prasarana serta Tingkat Produksi dan Pengembangan Komoditi Perkebunan;
2. Masih terbatasnya pelaksanaan Sertifikasi dan Pengawasan mutu benih, serta Peredaran benih dan pupuk di lokasi kebun masyarakat;
3. Belum optimalnya penanganan Pasca panen, pembinaan mutu dan pemasaran hasil perkebunan;
4. Belum terjangkaunya pelayanan Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) Perkebunan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) serta Kebakaran lahan perkebunan diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.

b. Faktor eksternal

❖ **Peluang (*opportunities*):**

1. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri terhadap produk tanaman perkebunan;
2. Adanya Kebijakan Nasional tentang program Grasida, Gratieks, Food Estate, Mitigasi, dan antisipasi perubahan iklim;
3. Adanya potensi Kearifan lokal terkait komoditi unggulan daerah Jambi

- (Kelapa sawit, Karet, Kelapa Dalam, Kopi, Pinang, Kakao, Kayu Manis dan Tembakau) serta Lahan yang Potensial;
4. Tersedianya Teknologi pengolahan dan Sarana pendukung serta industri pengolahan hasil perkebunan;

❖ **Tantangan (*threats*):**

1. Produksi dan produktifitas tanaman perkebunan masih dibawah potensi teknis;
2. Belum optimalnya kualitas SDM pelaku usaha perkebunan dan Kelembagaan petani;
3. Akses petani terhadap permodalan dan Sarana prasarana produksi serta pemasaran masih terbatas;
4. Kebakaran lahan untuk pengembangan komoditi perkebunan, dan indikasi meningkatnya alih fungsi lahan kebun masyarakat.

Selanjutnya terkait dengan isu strategis berdasarkan faktor internal dan eksternal tersebut dibuatlah strategi yang harus dilakukan, meliputi ;

1. *Strategi Strength (S) Kekuatan :*

- Dengan tersedianya regulasi tentang penyelenggaraan pembangunan perkebunan (Perda Provinsi Jambi No.19 tahun 2020 tentang Tata Niaga Perkebunan Provinsi Jambi) dan peraturan daerah tentang pembentukan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi maka diharapkan dinas Perkebunan dapat secara optimal melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam pembangunan bidang perkebunan.
- Peningkatan pelayanan berbasis masyarakat yang tertuang didalam Dokumen perencanaan RPJMN, RPJMD, dan Renstra SKPD serta adanya dukungan sarana prasarana kerja yang memadai.

2. *Strategi Weakness (W) Kelemahan ;*

- Pembangunan pusat data dan informasi statistik perkebunan melalui pemanfaatan teknologi Pemetaan GIS.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
- Peningkatan sarana dan prasarana dalam penanganan Pasca Panen, pembinaan Mutu dan pemasaran hasil perkebunan.

- Peningkatan pelayanan pengendalian OPT dan GUP serta Karhutlah di tingkat Kecamatan dan perdesaan.

3. *Strategi Opportunity (O) Peluang ;*

- Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran lahan dan kebun serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan.
- Peningkatan penyediaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil dalam rangka peningkatan mutu.
- Peningkatan produksi bahan baku berupa produk komoditi perkebunan pada wilayah industri-industri hilir.
- Peningkatan peluang usaha penangkaran benih komoditi perkebunan seiring dengan kebutuhan petani untuk meremajakan kebun.
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pengawasan peruntukan penggunaan lahan.

4. *Strategi Threat (T) Ancaman ;*

- Sosialisasi upaya peremajaan perkebunan rakyat sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas melalui perbaikan teknis budidaya.
- Sosialisasi Diversifikasi komoditi yang diusahakan guna memperkuat perekonomian keluarga tani.
- Pemaduan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis kedalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

1.4 Keadaan Pegawai

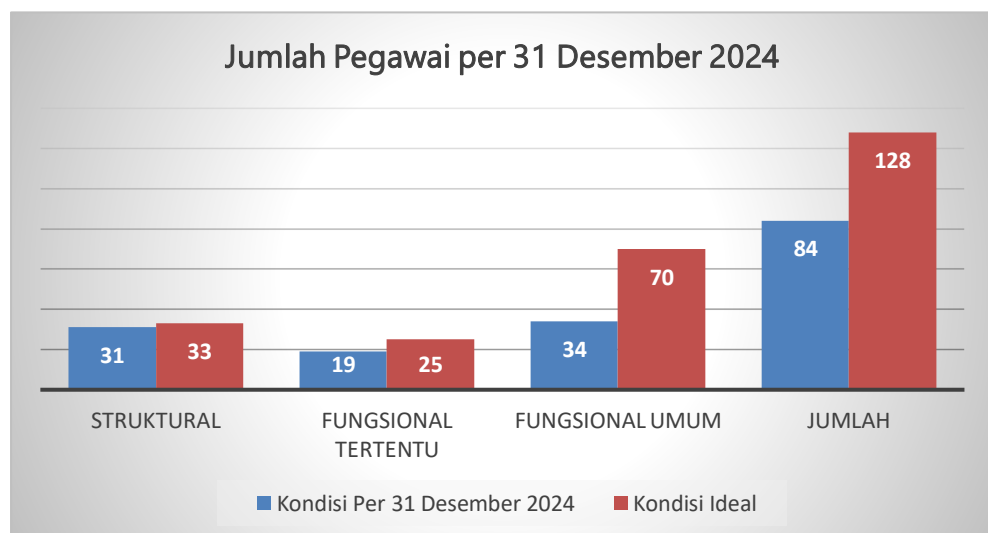
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perkebunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, dan serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, dan Peraturan Gubernur Jambi No.17 Tahun 2018, No.18 Tahun 2018 dan No.19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan

Provinsi Jambi di dukung sumberdaya yang tersebar dalam Instansi Induk (Dinas Perkebunan), UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan, UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan.

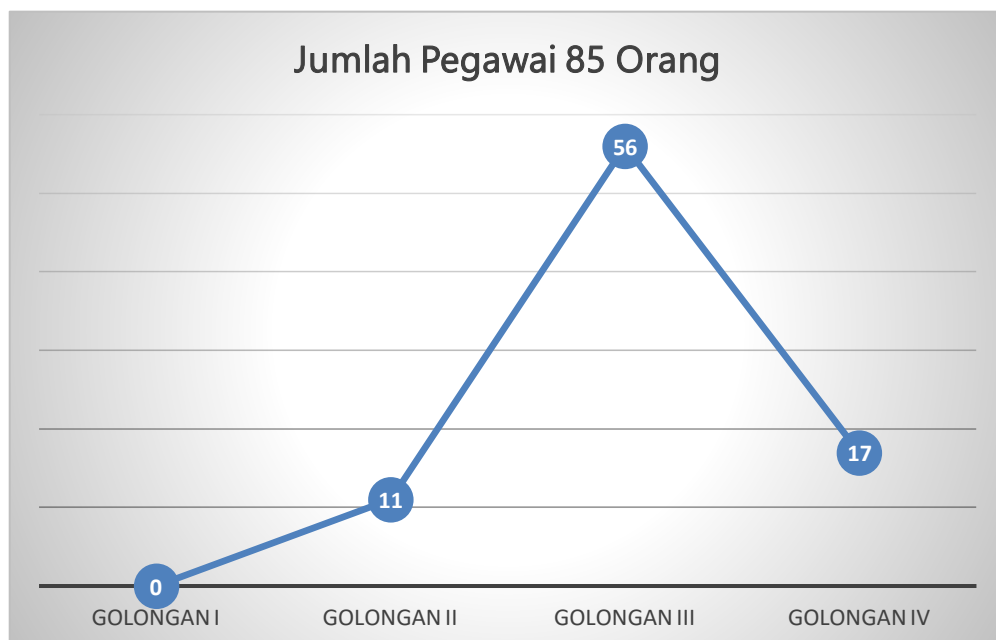
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 153 pegawai yang terdiri 85 orang ASN dan 68 orang Non ASN. Untuk 85 orang ASN meliputi ; 31 pejabat struktural, 19 pejabat fungsional tertentu, dan 34 pejabat fungsional umum. 19 pejabat fungsional tertentu meliputi ; 8 orang fungsional Penyuluh Pertanian, 3 orang fungsional Pengawas Benih Tanaman, 6 orang fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan 2 orang fungsional Perencana.

Profil Kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut :

Gambar 1.2. Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024



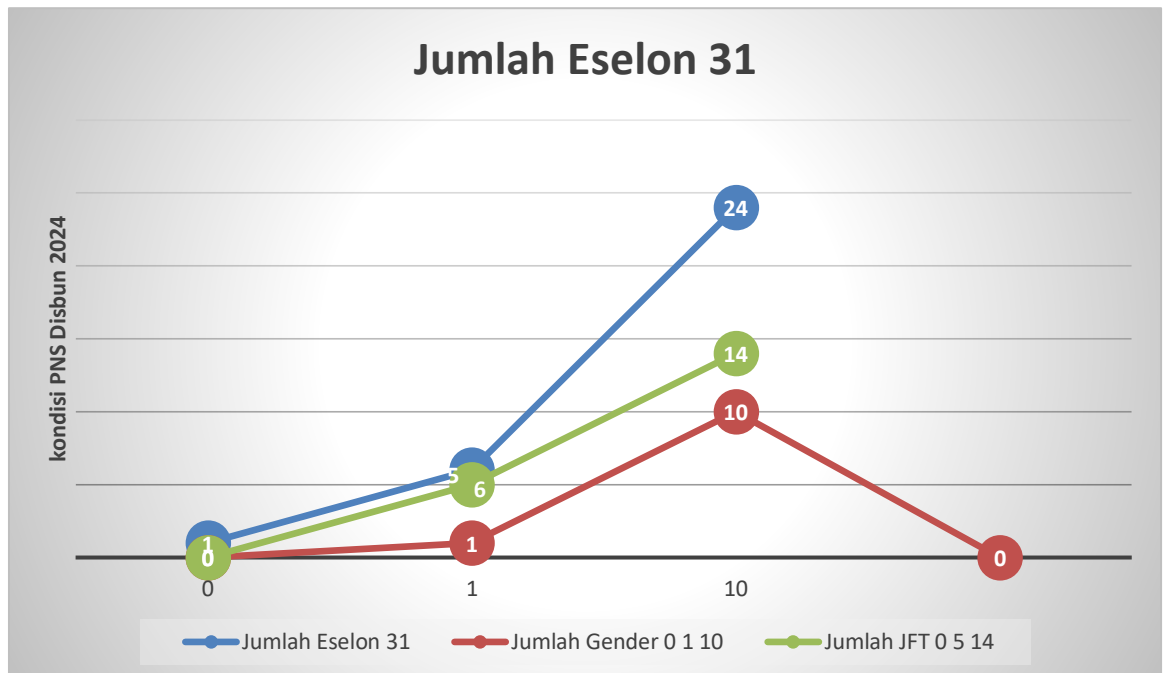
Gambar 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024



Berdasarkan 2 (dua) grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai dinas Perkebunan tahun 2024 masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai, dimana untuk posisi jabatan Struktural terpenuhi 31 orang dari kebutuhan sebanyak 33 orang, terdapat kekosongan jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 1 orang dan eselon IV sebanyak 1 orang (karena Purna bakti / pensiun), jabatan Fungsional Tertentu baru terpenuhi 19 orang dari jumlah kebutuhan sebanyak 25 orang dan masih diperlukan 6 orang lagi, begitu juga dengan jabatan Fungsional Umum baru terpenuhi 34 orang dari jumlah kebutuhan sebanyak 70 orang artinya masih diperlukan sebanyak 36 orang lagi. Bila kebutuhan jabatan tersebut telah terpenuhi sesuai dengan jumlah kebutuhan, maka dapat memberikan kinerja secara maksimal.

Berikut ini Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Dinas Perkebunan Provinsi Jambi :

Gambar 1.4. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024



Dari grafik di atas, bahwa terkait kesetaraan Jender di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dapat dijelaskan bahwa tahun 2024 jumlah PNS kaum Perempuan yang menduduki jabatan Struktural sebanyak 1 orang eselon III dan 10 orang eselon IV, untuk jabatan Fungsional Tertentu tersedia 14 orang. Atau sekitar 45 % kaum Perempuan menduduki eselon III dan IV, dan sekitar 73,68 % sebagai Fungsional Tertentu (Penyuluh Pertanian, Pengawas Mutu Hasil Perkebunan, dan Pengawas Benih Tanaman), maka dapat dikatakan bahwa Gender di dinas Perkebunan sudah mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya sudah memenuhi kuota Kesetaraan Jender.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 sebanyak 75 orang, sedangkan Sarjana S2 hanya 10 orang sementara terkait dengan jabatan fungsional tertentu (JFT) membutuhkan tingkat pendidikan sarjana yang memiliki kapabilitas yang tinggi.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sejauh ini cukup memadai untuk menunjang kinerja. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Daftar Sarana Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Tanah	1.342.818 M ²	Sebagian besar belum bersertifikat
2	Bangunan	15 Unit	7 unit rusak berat, 2 unit rusak sedang, 6 unit Baik, dan 3 unit dibebaskan.
3	Alat Angkut	47 Unit	29 Unit baik, 18 Unit rusak berat
4	Alat Pertanian	175 Unit	60 unit rusak ringan, 50 unit rusak berat, 51 baik
5	Alat Pengolah Data	101 Unit	65 Unit baik, 30 unit rusak berat, 6 unit rusak ringan,
6	Alat Laboratorium	6 Unit	6 Unit baik
7	Alat Rumah Tangga dan kantor	164 Unit	135 Unit baik, 25 unit rusak ringan, 2 unit rusak berat

Sumber : Data olahan Dinas Perkebunan Tahun 2024

Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan atau perbaikan (rehabilitasi) dan penambahan guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal. Tahun 2024 telah dialokasikan dana untuk Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor dinas Perkebunan, meliputi ; Bangunan, alat pertanian, alat pengolahan data, alat rumah tangga dan kantor serta penambahan alat Laboratorium 2 unit.

Terkait asset tanah dan bangunan semula luas lahan 1.343.318 M² berkurang menjadi 1.342.818 M² dan jumlah bangunan semula 18 unit berkurang menjadi 15 unit. Terjadi perubahan luas lahan dan jumlah bangunan tahun 2024 ini dikarenakan ada 3 unit Gedung (rumah dinas dan Gudang) seluas lahan 500 M² yang berlokasi di Kota Baru Kota Jambi terjadi perubahan kepemilikannya setelah melalui praperadilan di Kejaksaan Tinggi Jambi.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi pada tahun 2024 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mendapat alokasi APBD-murni sebesar **Rp.40.305.547.887,00-** kemudian melalui mekanisme APBD-Perubahan Pertama TA.2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp 39.573.307.060,00,-** terjadi pengurangan anggaran belanja sebesar **Rp. 732.240.827,00-**. Rincian belanja tidak langsung sebesar **Rp 14.336.755.932,00-** dan **belanja langsung sebesar Rp 25.236.551.128,00,-** Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar **Rp. 25.236.551.128,00,-** yang didukung oleh 6 program,15 kegiatan dan 32 subkegiatan, meliputi 7 kegiatan rutinitas kantor dan 8 kegiatan teknis dilapangan.

Selain Dana APBD, Tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Jambi juga mengelola Dana **APBN berupa Dana Tugas Pembantuan** sebesar **8.875.246.000,-** sedangkan untuk **Dana Dekonsentrasi** pada tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mendapatkan sebesar **Rp.695.600.000,00,-**

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj IP/manfaat LKj IP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2019, Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 10 Nopember 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

Tahun 2024 merupakan tahap ke 4, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi melaksanakan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya, yakni tahun 2016 - 2021.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 berupaya untuk melanjutkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2016-2021) berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya, Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2021-2026. Visi Gubernur Jambi bertema **“Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional”**. Tema visi Gubernur Provinsi Jambi tersebut dilandasi pada aspek **JAMBI MANTAP 2024**. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan **3 misi**, yakni :

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah.
3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 sebagai berikut,

Tebel.2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

Visi : “ Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Memantapkan Tata Kelola pemerintahan daerah.	Mewujudkan Tata kelola pemerintahan daerah yg bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan public berkualitas.	Indeks RB	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan Keuangan daerah.	- Nilai SAKIP - Hasil audit BPK - IKM
2	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan Kesejahteraan masyarakat.	Pertumbuhan Eknomi	- Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggul - Meningkatnya industry pengolahan. - Meningkatkan peran sector Pariwisata serta industry kecil dan Menengah pendukung. - Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan	-Distribusi sector primer thd PDRB -Distribusi industry pengolahan non migas thd PDRB -Distribusi sector tersier thd PDRB -Jalan Provinsi -Rasio Elektrifikasi. -Persentase Luas sawah beririgasi

				infrastruktur dasar. - Meningkatnya kualitas Lingkungan	-Indeks kualitas Lingkungan Hdp
			Angka Kemiskinan	- Menurunnya Tingkat Pengangguran - Meningkatkan ketersediaan Pangan dan kemudahan akses thdp Pangan.	- Tingkat Pengangguran terbuka. -Indeks Ketahanan Pangan.
3	Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia yang Terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.	Indeks Pembangunan Manusia	-Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat -Meningkatnya kualitas Pendidikan. -Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam Seni Budaya -Meningkatnya toleransi intra dan antar agama. -Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan.	-Usia Harapan Hidup. -Rata-rata Lama sekolah. -Persentase RT yg menyelenggarakan upacara adat. -Indeks kebebasan dari Diskriminasi. -Indeks Pemberdayaan Gender.

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Bertitik tolak dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah melalui beberapa Strategi, yaitu :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun.
2. Peningkatan Pendapatan petani yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian.
3. Peningkatan kualitas pelayanan internal Dinas Perkebunan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.
2. Meningkatkan Pendapatan petani melalui peningkatan NTUP-sub sektor Perkebunan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang Administrasi dan Manajemen kelembagaan.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan.
2. Meningkatnya Pendapatan petani, buruh dan pekerja lainnya.
3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Rincian Target dari masing-masing Sasaran tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.1.2. Sasaran Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2020	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Nilai SAKIP OPD	Nilai	60,08 (B)	65,00 (B)	67,00 (B)	72,00 (BB)	73,00 (BB)	75,00 (BB)	75,00 (BB)
		IKM	Skor	80	83	85	85	88	88	88
2	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan	Produksi Komoditi Unggulan : Kelapa sawit	Ton	1.830.035	1.920.324	1.950.054	2.000.004	2.030.531	2.073.290	2.073.290
		Kelapa		108.789	116.475	118.003	110.043	111.486	112.949	112.949
		Karet		353.145	364.906	369.277	327.638	331.563	335.535	335.535
		Kopi		16.379	16.511	17.573	25.346	26.976	28.710	28.710
		Pinang		13.732	14.165	14.341	14.519	14.699	14.882	14.882
		Coklat		826,00	867.30	908.60	949,9	991,20	1.032	1.032
		Kayu Manis		57.072	53.422	53.679	53.937	54.196	54.452	54.452
3	Meningkatnya Pendapatan petani	NTUP Sub Sektor Perkebunan	Persen	117,83	120,69	122,76	125,04	127,25	127,53	127,53

Sumber : Renstra Perubahan dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.3. Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Strategis	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman Perkebunan.	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untu kesejahteraan pekebun.	Peningkatan produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
			Meningkatkan Nilai tambah yang berdaya saing dan Berkelanjutan dengan mengembangkan industri Hilir, pemasaran, dan Ekspor.
			Meningkatkan akses Kemitraan pemasaran dan pengembangan informasi pasar.
			Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan Kawasan.
			Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan yang lebih baik.
			Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan Lingkungan
			Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan di tataran domestik dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing
			Mewujudkan fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan dan penanganan gangguan usaha perkebunan.
			Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.
			Mendorong sistem pertanian bio-industri berbasis pengembangan komoditas perkebunan.
			Mendorong peningkatan konservasi dan rehabilitasi lahan perkebunan serta Emisi Carbon.

2.	Meningkatnya Pendapatan Petani	Peningkatan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia petani dan kualitas kelembagaan Sosial ekonomi petani serta pelaku usaha perkebunan.
			Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan penyuluhan dan Lembaga Swadaya masyarakat yang maju dan berkelanjutan.
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.	Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD	Peningkatan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien.
			Peningkatan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
			Peningkatan pelayanan public bidang perkebunan secara akuntabel dan profesional.

Sumber : Renstra-Perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan PK instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman Perkebunan	- Luasan Kelapa Sawit (Hektar) - Luasan Kayu Manis (Hektar) - Luasan Kopi (Hektar) - Produksi KelapaSawit (CPO/Ton) - Jumlah Cakupan Pengendalian OPT (Ha) - Produktivitas Karet (Kg/Ha) - Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)	1.106.222 46.966 31.006 2.332.223 125 900 1.200
2.	Meningkatnya Pendapatan Petani.	NTUP Perkebunan	127,25
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, dan Akuntabilitas.	- Skor IKM - Nilai SAKIP	88,00 (A) 73,00 (BB)

Sumber : Data PK Th.2024 dan Renstra Perubahan dinas Perkebunan Provinsi Jambi 2021-2026

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024 (Target dan Realisasi)

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan berdasarkan dana APBD Provinsi Jambi dan APBN Pusat. Alokasi dana APBD yang bersumber dari APBD murni semula sebesar Rp. 40.305.547.887,00,- selanjutnya melalui mekanisme **Perubahan APBD 2024** menjadi sebesar **Rp 39.573.307.060,00,-** atau mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 732.240.827,00,- atau menurun 1,04 %.

Selanjutnya melalui dana APBN yaitu untuk kegiatan Tugas Pembantuan (APBN-TP), dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 8.875.846.000,00,-**. Sedangkan melalui alokasi **Dana Dekonsentrasi** untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis serta Penguatan perlindungan Perkebunan mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 695.600.000,00,-**.

2.3.1 Target Belanja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp. **39.573.307.060,00,-** dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 14.336.755.932,00- dan **belanja langsung sebesar Rp 25.236.551.128,00.** Dari Anggaran Belanja Langsung dialokasikan untuk program/kegiatan utama sebesar **Rp.8.644.833.338,00,-** atau (34,26%), sedangkan untuk program/kegiatan pendukung sebesar **Rp.16.591.717.790,00,-** atau (65,74 %). Anggaran untuk program/kegiatan pendukung dengan porsi 65,74 % merupakan kegiatan Penunjang Urusan Daerah, Dimana pos alokasi terbesar adalah peruntukan Gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp. 13.911.595.932,00,- atau sebesar 83,85 %.

**Tabel 2.3.1. Target Belanja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi APBD
Perubahan Tahun 2024;**

No	Uraian	Target	Prosentasi
1	Belanja Tidak Langsung Non Keistimewaan	-	-
2	Belanja Tidak Langsung Keistimewaan	-	-
3	Belanja Langsung Non Keistimewaan	-	-

Sumber : DPA-Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Tahun 2024

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.2. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Th.2024.**

No	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Ket
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan	8.280.932.390,00	21,00	2 Program 4 kegiatan
2.	Meningkatnya Pendapatan Petani, buruh tani dan pekerja lainnya	14.700.656.880,00	38,00	3 Program 4 kegiatan
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	16.591.717.790,00	41,00	1 Program 7 Kegiatan
	Jumlah	39.573.307.060,00	100,00	6 Program 15 kegiatan

Sumber : DPA-APBDP Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa **porsi Anggaran sasaran #1** Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan perkebunan dialokasikan sebesar **21,00 %** mengalami penurunan sebesar 19,32 persen bila dibandingkan tahun 2023 mencapai angka **40,32 %**, diikuti dengan **sasaran #2** Meningkatnya Pendapatan petani, buruh tani, dan pekerja lainnya sebesar **38,00 %** mengalami peningkatan sebesar 6,53 persen bila dibandingkan tahun 2023 hanya mendapat angka 31,47 %, sedangkan **sasaran #3** Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dialokasikan sebesar **41,00 %** mengalami peningkatan sebesar 12,79 persen bila dibandingkan tahun 2023 hanya mendapat angka **28,21 %**.

Alokasi anggaran Sasaran #1 untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi unggulan perkebunan terlihat lebih kecil bila dibandingkan dengan yang lain hal ini lebih kepada pertimbangan kondisi keuangan daerah, dan selanjutnya porsi anggaran untuk sasaran #2 untuk Meningkatkan Pendapatan petani, buruh tani, dan pekerja lainnya mengalami kenaikan, adanya kenaikan porsi anggaran ini disebabkan adanya dukungan alokasi dana pusat baik melalui kucuran anggaran BPDPKS, DBH-Sawit, dan DBHCHT TA. 2024.

2.4 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024, digunakan instrumen-instrumen pendukung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yaitu dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Perkebunan tahun 2024 di seluruh Indonesia telah menerapkan aplikasi berbasis online sampai kepada proses Monitoring dan Evaluasi kegiatan, yang meliputi ;

1. E-Proposal ; Penyusunan proposal kegiatan berbasis online
2. E-Monev ; Pelaporan hasil Monev secara online
3. E- SAKIP ; Sistem akuntabilitas kinerja instansi berbasis online
4. Aplikasi KRISNA (DAK) ; Kolaborasi Perencanaan dan Informasi kinerja anggaran secara online
5. Aplikasi SIRUP ; Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis online.
6. Aplikasi SAKTI ; Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi secara online.
7. Aplikasi PAKET ; Pelaporan Kinerja Evaluasi Terintegrasi berbasis online.
8. Aplikasi LPPK ; Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan secara online.
9. E-Renstra ; Penyusunan Renstra berbasis online.
10. SIPD : Sistem Informasi Pemerintah Daerah
11. PPID : Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interva Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jambi

PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2024 menyumbang 22,40 % untuk PDRB Provinsi Jambi dan diantaranya berasal dari sub sektor Perkebunan sebesar 70,45 %. Peningkatan signifikan terlihat pada kenaikan angka produksi komoditi unggulan perkebunan dikarenakan adanya program kegiatan untuk perbaikan teknis budidaya, yaitu melalui penyediaan dan pengembangan Sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian serta penguatan kelembagaan petani.

Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi Kinerja (LKj)	Capaian %
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman Perkebunan	1.Luasan Kelapa Sawit (Ha)	1.106.222	1.126.358	101,82
		2.Luasan Kayu Manis (Ha)	46.966	46.250	98,47
		3.Luasan Kopi (Ha)	31.006	30.848	99,49
		4.Produksi Kelapa Sawit (CPO/Ton)	2.332.223	2.466.303	105,74
		5.Jumlah Cakupan Pengendalian OPT (Ha)	125	125	100,00
		6.Produktivitas Karet (Kg/Ha)	900	891	99,00
		7.Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)	1.200	1.215	101,25
2.	Meningkatnya Pendapatan Petani	8.NTUP Perkebunan	127,25	151,87	119,34
3.	penyelenggaraan Pemda yang bersih, transparan dan akuntabel.	9. Nilai Sakip	73,00	70,45	96,51
		10.Skor IKM	88,00	85,35	96,99

Sumber : BPS Provinsi Jambi; Data olahan Dinas Perkebunan Prov. Jambi tahun 2024.

Berdasarkan tabel 3.2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian IKU tahun 2024 pada masing-masing Sasaran strategis, sebagai berikut ;

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, pada tahun 2024 capaian kinerja untuk indikator produksi tanaman Perkebunan (komoditi unggulan daerah) rata-rata sebesar **100,82 %** bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 99,49 % atau mengalami peningkatan sebesar **+1,33 %**, sedangkan capaian kinerja indikator produktivitas tanaman perkebunan tahun 2024 tercatat 4,65 %, mengalami peningkatan sebesar **+0,03 %** bila dibandingkan tahun 2023 hanya mencapai 4,62 %. Bila dilihat dari target Renstra Disbun tahun 2024 ditargetkan sebesar 4,80 %, maka Tingkat capaian kinerja hanya sebesar 96,87 %.

2. Meningkatnya pendapatan petani dengan capaian angka Nilai Tukar Usaha Petani subsector perkebunan (NTU-P) 151,87 % dari target semula sebesar 127,25 % atau meningkat sebesar **119,34 %**, Bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar **+10,27 %**, dimana pada tahun 2023 NTUP subsektor perkebunan terealisasi sebesar 141,60 %. Berdasarkan target didalam Renstra pada tahun 2024 NTUP sebesar 127,25 % dan terealisasi sebesar 151,87 % atau meningkat sebesar **+24,62 %**, dan tahun 2023 ditargetkan sebesar 125,04 dapat terealisasi sebesar 141,60 % atau meningkat sebesar **+16,56 %**.
3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja Nilai Sakip dan Skor IKM, capaian kinerja tahun 2024 sebesar **96,99 %**, bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 95,65 %, sedikit mengalami peningkatan angka capaian sebesar **+1,34 %**, hal ini disebabkan target kinerja PK tahun 2024 yang ditetapkan lebih tinggi dari tahun 2023, namun bila dicermati secara per item capaian realisasi kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023. Berdasarkan target didalam Renstra pada tahun 2024 untuk Nilai Sakip sebesar 73,00 dan terealisasi sebesar 70,45, atau capaiannya hanya sebesar 96,50 % dan bila dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 67,91 maka mengalami peningkatan sebesar **+2,54 %**, begitu juga dengan Skor IKM ditargetkan 88,00 dan terealisasi sebesar 85,35 atau capaiannya hanya sebesar 96,98 % dan bila dibandingkan realisasi tahun 2023 tercapai sebesar 84,64, maka sedikit mengalami peningkatan sebesar **+0,71 %**

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi memiliki 3 (tiga) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Pada **tahun 2024**, indikator sasaran tersebut secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan dari total indikator dengan **persentase capaian sebesar 105,72 %** atau secara umum dapat dikategorikan **Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi termasuk Hijau Tua**, dan Bila dibandingkan dengan **tahun 2023**, dimana Capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebesar **101,37 %** atau mengalami peningkatan sebesar **+4,35 %**, hal ini disebabkan adanya peningkatan angka pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran

Strategis tahun 2024.

Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator nerja	Satuan	Target	Realisasi	Perse ntase	Kriteria/ Kode warna
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perkebunan	Luasan Kelapa Sawit	Hektar	1.106.222	1.126.358	101,82	Hijau Tua
		Luasan Kayu Manis	Hektar	46.966	46.250	98,47	Hijau Tua
		Luasan Kopi	Hektar	31.006	30.848	99,49	Hijau Tua
		Produksi Kelapa Sawit (CPO)	Ton	2.332.223	2.466.303	105,74	Hijau Tua
		Jumlah Cakupan Pengendalian OPT	Hektar	125	125	100,00	Hijau Tua
		Produktivitas Karet	Kg/Ha	900	891	99,00	Hijau Tua
		Produktivitas Kelapa	Kg/Ha	1.200	1.215	101,25	Hijau Tua
2.	Meningkatnya Pendapatan petani, buruh tani, dan lainnya	NTUP- Sub Sektor Perkebunan	Persen	127,25	151,87	119,34	Hijau Tua
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.	Nilai SAKIP	Persen	73,00	70,45	96,51	Hijau Tua
		Skor IKM	Persen	88,00	85,35	96,99	Hijau Tua

Sumber : Data Olahan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2024

Berdasarkan tabel 3.2.2 diatas untuk masing-masing indikator kinerja memiliki angka capaian kinerja yang bervariasi, yaitu ; rata-rata angka 96,51 – 119,34 persen, Capaian yang terendah adalah indikator Nilai Sakip, dan capaian yang tertinggi adalah indikator Angka NTUP-subsektor Perkebunan.

Selanjutnya realisasi Capaian kinerja selama kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat diuraikan pada table. 3.2.3. berikut ini ;

Tabel.3.2.3. Realisasi Kinerja serta Capaian kinerja tahun 2024 dengan Tahun lalu 2023 dan Tahun 2022.

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN TAHUN 2024		
		2022	2023	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Luasan Sawit (Ha)	1.099.191	1.097.689	1.106.222	1.126.358	101,82
2	Luasan Kayumanis (Ha)	46.210	46.360	46.966	46.250	98,47
3	Luasan Kopi (Ha)	30.855	30.886	31.006	30.848	99,49
4	Produksi Sawit (Ton)	2.202.122	2.298.301	2.332.223	2.466.303	105,74
5	Cakupan OPT (Ha)	100	125	125	125	100,00
6	Produktivitas Karet (Kg/Ha)	933	912	900	891	99,00
7	Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)	1.211	1.213	1.200	1.215	101,25
8	NTUP-Subsektor Perkebunan (Persen)	142,29	141,60	127,25	151,87	119,34
9.	Nilai Sakip (Persen)	67,74	67,91	73,00	70,45	96,51
10	Skor IKM (Persen)	83,45	85,35	88,00	85,35	96,99

Sumber : LKj 2021-2023 dan Data Olahan Dinas Perkebunan Prov.Jbi Tahun 2024.

Berdasarkan tabel.3.2.3 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk 4 (empat) tahun terakhir (2021-2024) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk masing-masing indicator kinerja sebagai berikut ;

1. Nilai Sakip, rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan sebesar +6,5 %.
2. Skor IKM, rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan sebesar +1,4 %.
3. Luasan Sawit, rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan sebesar +3,4 %.
4. Luasan Kayu Manis, rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan sebesar +0,5 %.
5. Luasan Kopi, rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan sebesar +1,3 %.
6. Produksi Sawit, rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan sebesar +2,3 %.
7. Cakupan pengendalian OPT, rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan sebesar +29,2 %.
8. Produktivitas Karet, rata-rata setiap tahun mengalami penurunan sebesar -0,9 %.
Adanya penurunan produktivitas Karet ini disebabkan selain umur tanaman karet Tua juga kurangnya perawatan dan pemeliharaan tanaman Karet terutama asupan pupuk secara berkala.
9. Produktivitas Kelapa, rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan sebesar +0,6 %.

10.NTUP-Sub sektor Perkebunan, rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan sebesar +8,8 %.

Tabel.3.2.4.Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah Dalam dokumen Renstra Dinas Perkebunan Prov.Jambi 2021-2026

NO	INDIKATOR	AWAL RPJMD 2021	REALISASI			REALISASI 2024	CAPAIAN S/D 2024 THD TARGET 2025
			2021	2022	2023		
1	Luasan Sawit	1.027.477	1.027.477	1.099.191	1.097.689	1.126.358	93,85
2	Luasan Kayumanis	45.889	45.889	46.210	46.360	46.250	96,10
3	Luasan Kopi	30.103	30.103	30.855	30.886	30.848	101,28
4	Produksi Sawit	2.198.834	2.198.834	2.202.122	2.298.301	2.466.303	118,95
5	Cakupan OPT	75	75	100	125	125	83,33
6	Produktivitas Karet	930	930	933	912	891	99,00
7	Produktivitas Kelapa	1.210	1.210	1.211	1.213	1.215	97,20
8	NTUP-Subsektor Perkebunan	120,51	120,51	142,29	141,60	151,87	119,08
9.	Nilai Sakip	60,08	60,08	67,74	67,91	70,45	93,93
10	Skor IKM	83,00	83,00	83,45	85,35	85,35	96,98

Sumber : Renstra 2021-2026, LKj 2021-2023 dan Data Olahan Dinas Perkebunan Prov.Jbi Tahun 2024.

Berdasarkan tabel.3.2.4 diatas dapat dijelaskan bahwa **capaian kinerja tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD tahun 2026** secara umum rata-rata mencapai **99,97 %** atau dikategorikan sangat berhasil dan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 tercatat 98,29 % maka **terjadi peningkatan sebesar +1,68 %**, hal ini didukung dengan keberhasilan capaian kinerja untuk indikator Luasan komoditi Perkebunan dan peningkatan produksi tanaman Perkebunan meningkat sebesar **+1,33 %** bila dibandingkan tahun 2023 serta **peningkatan capaian angka NTUP-subsektor Perkebunan tahun 2024** sebesar **+10,27 %** bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2024, Capaian Kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Dinas Perkebunan Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar **92,93 %** yang meliputi rata-rata Capaian kinerja Sasaran Strategis tercatat sebesar 105,72 %, dan rata-rata Capaian kinerja Program/Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2024 tercatat sebesar **80,13 %**. Bila dibandingkan dengan Capaian kinerja pada

tahun 2023 hanya mencapai **100,64 %** maka pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **-7,71 %**.

Secara detil capaian kinerja untuk Sasaran Strategis Dinas Perkebunan dijabarkan dalam sebagai berikut :

Sasaran #1 : Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dengan indikator kinerjanya yakni persentase peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah untuk kesejahteraan pekebun dengan capaian kinerja sebesar **100,86 %**. Nilai Capaian Kinerja Sasaran ke-1 ini dapat dikategorikan **Hijau Tua**. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 99,49 % atau mengalami peningkatan sebesar **+1,37 %**, sedangkan capaian kinerja indikator produktivitas tanaman perkebunan tahun 2024 tercatat 4,65 %, mengalami peningkatan sebesar **+0,05 %** dan bila dibandingkan tahun 2023 tercatat 4,60 %. Bila dilihat dari target Renstra Disbun tahun 2024 ditargetkan sebesar 4,80 %, maka Tingkat capaian kinerja hanya sebesar 96,87 %. Sasaran ini dicapai melalui program Penyediaan dan pengembangan PraSarana pertanian yang operasionalisasinya didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan 5 sub kegiatan, dan melalui program Penyediaan dan pengembangan Sarana pertanian yang operasionalisasinya didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 4 subkegiatan.

Sasaran #2 : Meningkatnya Pendapatan petani dengan indikator kinerjanya yakni persentase peningkatan NTUP-Perkebunan. **Tahun 2024** angka Nilai Tukar Usaha Petani subsector perkebunan (**NTU-P**) **151,87 %**, bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar **+10,27 %**, dimana pada tahun 2023 NTUP subsector perkebunan terealisasi sebesar 141,60 %. Berdasarkan target didalam Renstra pada tahun 2024 NTUP sebesar 127,25 % dan terealisasi sebesar 151,87 % atau meningkat sebesar **+24,62 %**, dan tahun 2023 ditargetkan sebesar 125,04 dapat terealisasi sebesar 141,60 %. Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) program utama, yaitu; 1) program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, 2) program Perizinan Usaha Pertanian, dan 3) program Penyuluhan pertanian dengan **capaian kinerja sebesar 67,81 %**, yang operasionalisasinya didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan 5 sub kegiatan. Nilai Capaian Kinerja Sasaran 2 ini dapat dikategorikan **Kuning Tua**. Bila dibandingkan dengan **Capaian di tahun 2023 sebesar 113,24 %**, maka mengalami penurunan yang cukup serius sebesar -

45,43 %, hal ini disebabkan oleh rendahnya serapan anggaran untuk masing-masing kegiatan pada 2 (dua) program terutama sekali rendahnya serapan anggaran pada program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi hanya mencapai 37,99 persen dan Capaian program Penyuluhan Pertanian hanya 45,74 persen. Selain itu juga akibat dampak gejolak harga ekspor yang mengalami penurunan untuk beberapa komoditi unggulan seperti ; Karet, Kelapa Dalam, dan Pinang yang terus mengalami penurunan harga jual dipasar international. Berdasarkan *Berita Resmi Statistik Provinsi Jambi bulan Oktober 2023* bahwa Nilai ekspor komoditi Perkebunan Jambi sebesar US\$ 159,25 juta dan bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar US\$ 218,54 juta, maka mengalami penurunan sebesar **-27,13 %** sementara untuk Kelapa Sawit, Kopi, dan Kayu Manis mengalami fluktuasi Naik dan turun.

Sasaran #3: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan indikator kinerjanya yakni Persentase Nilai Sakip dan Skor IKM yang berdampak pada kualitas pelayanan internal OPD dengan capaian kinerja sebesar **95,65 %**. Sasaran ini dicapai melalui program Penunjang urusan pemerintahan daerah yang operasionalisasinya didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dengan 17 subkegiatan. Nilai Capaian Kinerja Sasaran 1 ini dapat dikategorikan **Hijau Tua**.

Selanjutnya Capaian kinerja untuk Program sesuai dengan dukungan masing-masing kegiatan Dinas Perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Capaian Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi	-Nilai SAKIP -Angka IKM -Anggaran	73,00 87,00 16.591.717.790,00	70,45 86,34 15.552.778.354,00	96,51 99,24 93,74
	- Perencanaan, Peng- anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Anggaran	611.516.280,00	556.401.000,00	90,99
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Anggaran	14.336.755,932	13.425.065.441,00	93,64
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Anggaran	16.500.000,00	10.200.000,00	61,82
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Anggaran	621.031.889,00	594.605.559,00	95,74

	- Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemda.	Anggaran	41.426.393,00	40.973.000,00	98,91
	- Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemda.	Anggaran	398.406.896,00	342.696.225,00	94,20
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemda.	Anggaran	566.080.400,00	518.813.506,00	91,65
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	-Anggaran	7.699.340.490,00	6.861.025.524,00	89,11
	-Pengawasan peredaran Sarana pertanian.	Anggaran	153.050.000,00	128.899.900,00	84,22
	- Pengawasan Mutu, Penyediaan, dan Peredaran benih tanaman.	Anggaran	7.418.095.208,00	6.326.560.938,00	88,81
	- Pengelolaan Sumber Daya Genetik(SDG) hewan,tumbuhan, dan Mikro organisme kewenangan Provinsi	Anggaran	128.195.282,00	113.803.282,00	88,77
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-Anggaran	581.591.900,00,-	404.501.150,00	69,55
	- Penataan Prasarana pertanian.	Anggaran	581.591.900,00	404.501.150,00	69,55
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-Anggaran	3.577.119.420,00	1.572.427.672,00	43,96
	- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi.	Anggaran	3.577.119.420,00	1.572.427.672,00	43,96
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	-Anggaran	2.137.854.100,00	2.013.550.527,00	94,72
	- Penertiban Izin Usaha Pertanian Provinsi.	Anggaran	2.137.854.100,00	2.013.550.527,00	94,72
6.	Program Penyuluhan Pertanian	-Anggaran	8.997.683.360,00	5.304.894.000,00	58,96
	-Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian.	Anggaran	6.997.683.360,00	3.520.000.600,00	50,30

	-Pengembangan kapasitas kelembagaan Ekonomi petani berbasis Kawasan.	Anggaran	2.000.000.000,00	1.784.893.400,00	89,24
	Total : Rata-rata :	Anggaran Persen	39.573.307.060,00	31.709.177.227,00	80,13

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan tahun 2024, sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi

Capaian kinerja program ini secara umum tercatat sebesar **96,50 %**, mengalami **penurunan sebesar -2,94 %** bila dibandingkan dengan tahun 2023 tercatat **99,44 %**. Penurunan capaian kinerja ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya serapan anggaran pada kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah hanya mencapai 61,82 %. Pada Program ini terdapat sebanyak 7 kegiatan dengan anggaran Rp. **16.591.717.790,00,-** dan realisasi serapan sebesar Rp. **15.552.778.354,00,-** atau **93,74 %** dan realisasi fisik mencapai **95,00 %**.

Output kegiatan adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik (Jasa surat menyurat, jasa listrik, air & komunikasi, jasa keuangan, ATK, makan minum, instalasi listrik, bahan bacaan dan rapat-rapat koordinasi, penyediaan peralatan gedung, penyediaan mebelair, operasional kendaraan dinas, pemeliharaan rutin kendaraan dinas, dan pengadaan komputer), terlaksananya pemutakhiran laporan keuangan dan Asset, dan tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Rencana Kerja OPD, Evaluasi Capaian Kinerja OPD, Laporan Kinerja Instansi OPD serta tersusunnya Statistik Perkebunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban pada DinasPerkebunan Provinsi Jambi.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang administrasi dan manajemen perkantoran serta meningkatnya kualitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Permasalahan yang ada terkait dengan serapan anggaran pada program ini mencapai 93,74 % yang disebabkan oleh proses Refocusing anggaran yang lamban dan ada beberapa paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena pemblokiran dana kegiatan oleh Bakeuda sehubungan dengan

terbitnya Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Penundaan Belanja Yang Tidak Prioritas pada APBD Provinsi Jambi TA. 2024 dan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Pelaksanaan Mekanisme Belanja APBD Tahun 2024, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.

Solusi yang diambil adalah perlu merumuskan Mitigasi Resiko untuk masing-masing kegiatan, selanjutnya melakukan revaluasi kembali terhadap Target dan Sasaran kegiatan yang telah dibuat, perlu menetapkan kembali kegiatan Prioritas utama serta upaya percepatan pelaksanaannya.

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- a. Pada program ini terdapat 3 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **7.699.340.490,00,-** dan sampai akhir tahun 2024 penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp. **6.861.025.524,00,-** , atau **89,11 %**, terdapat **sisa** anggaran sebesar Rp.**838.314.966,00,-** atau **10,89 %** yang merupakan **silpa**. Terdapat Sisa anggaran sebesar 10,89 % tersebut berasal dari kegiatan Pengawasan peredaran sarana pertanian sebesar Rp.24.150.000,00,- (34,01 %) dan kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan sebesar Rp.797.214.270,00,- (10,78 %), subkegiatan Pengembangan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG tumbuhan dan mikroorganisme terdapat sisa belanja pegawai dan belanja persediaan/barang yang diserahkan kepada masyarakat pada sebesar Rp. 14.392.000,00,- (11,23 %),
- b. Khusus sub kegiatan Pengawasan Mutu, dan Peredaran Benih hortikultura, tanaman pangan dan Perkebunan bersisa sebesar Rp. 459.659.635,00,- dengan rincian berikut ;
 1. Sisa belanja pegawai pada subkegiatan Pengelolaan penerbitan sertifikat benih sebesar Rp. 2.558.596,00,-
 2. Sisa belanja pegawai pada subkegiatan Pengawasan Mutu dan peredaran benih perkebunan sebesar Rp. 19.320.000,00,-
 3. Sisa belanja persediaan/barang yang diserahkan kepada masyarakat pada subkegiatan Pengawasan Mutu dan peredaran benih perkebunan sebesar Rp. 797.214.270,00,- yang meliputi;

- Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 26.180.000,00,-
- Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.5.490.000,-
- Belanja barang (program DBHCHT) untuk diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp.194.024.500,00,-
- Belanja jasa untuk diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp.13.500.000,00,-
- Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 337.842.642,00,- dan
- Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp.188.625.000,00,-

Output kegiatan adalah penyediaan sarana pertanian yang berupa Benih/bibit tanaman perkebunan, pupuk, alat dan mesin pertanian serta obat-obatan; Pembinaan dan pengawasan terkait peredaran pupuk dan pestisida dan sarana pertanian lainnya; serta Pengembangan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG tumbuhan dan mikro organisme.

Outcome kegiatan adalah meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan khususnya bagi komoditi unggulan daerah, serta dapat meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah bagi petani.

Permasalahan yang terjadi adalah selain faktor musim kemarau Panjang (elnino), juga keterbatasan waktu yang tersedia untuk proses pengadaan barang dan jasa hanya 2 (dua) bulan efektif, hal ini disebabkan oleh dampak dari proses Refocusing dan Pembahasan APBD Perubahan yang lamban dan ditetapkan pada akhir bulan Oktober 2024 sehingga hanya ada waktu 2 bulan yang efektif untuk pelaksanaan fisik dilapangan tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan kegiatan tersebut.

Solusi yang diambil adalah perlu komitmen Bersama para pemangku kepentingan agar adanya Jaminan kepastian anggaran untuk pelaksaasn fisik dilapangan, dan perlu juga komunikasi yang baik dan jelas antara Penyedia bibit (Penangkar) dengan pihak pelaksana kegiatan terkait dengan kondisi cuaca yang tidak menentu.

3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Pada program ini telah dilaksanakan kegiatan Penataan Prasarana pertanian dengan anggaran Rp. **581.591.900,00,-** dan terealisasi sebesar

Rp. **404.501.150,00,-** atau **69,55 %** terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 177.090.750,00,- atau sebesar 30,45 %.

Sisa anggaran tersebut berasal dari sisa kontrak dan biaya operasional sub kegiatan berikut ;

- a. Perencanaan pengembangan Prasarana, Kawasan dan komoditas pertanian sebesar Rp. 50.143.400,00,- yang meliputi sisa belanja barang dan jasa, belanja makanan dan minuman rapat dan pertemuan FGD, dan belanja perjalanan dinas biasa.
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana pendukung pertanian lainnya berupa belanja barang dan jasa sebesar Rp. 126.947.350,00,- yang meliputi belanja barang habis pakai sebesar Rp. 22.468.150,00,-, belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 18.540.000,00,-, belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 112.618.290,00,-

Output kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian, penataan prasarana pertanian adalah pertemuan dan rapat penetapan harga TBS, Pameran/Promosi produk hasil panen komoditi Perkebunan, Sertifikat IG Kopi Robusta Kota Sungai Penuh.

Outcome tersedianya informasi harga TBS, dokumen perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas perkebunan, dan Pengembangan Prasarana pertanian untuk komoditi Perkebunan, serta meningkatkan daya saing produk hasil panen komoditi unggulan daerah.

Permasalahan ; Survey harga pasar terhadap barang didalam Kontrak pekerjaan yang tidak tepat, masih banyak ditemukan harga jual TBS dikalangan Masyarakat non plasma tidak mempedomani harga TBS yang telah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Solusi yang diambil adalah perlu dilakukan survey harga pasar secara terpadu dan meningkatkan koordinasi dengan dinas teknis serta meningkatkan kualitas perencanaan untuk kegiatan teknis yang ada di setiap bidang yang melibatkan institusi atau Lembaga khusus yang berkaitan dengan penetapan Kawasan dan komoditas perkebunan. Terkait harga TBS dikalangan Masyarakat non plasma perlu kesepakatan dengan pihak Pabrikan.

4) Program Pengendalian Bencana Pertanian

Pada program ini dilaksanakan Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. **3.577.119.420,00,-** dan sampai akhir Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. **1.572.427.672,00,-** atau mencapai **43,96 %**. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. **2.004.691.748,00,-** atau 56,04 %, sisa anggaran ini berasal dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, sisa penawaran kontrak paket pekerjaan, biaya rapat/pertemuan, biaya operasional ke lapangan, dan ada kegiatan fisik yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan perubahan pelaksanaan Mekanisme belanja APBD TA.2024 sebagaimana Surat Edaran Gubernur No.1 Tahun 2024 dan No.9 Tahun 2024, rincian sisa anggaran tersebut meliputi ;

- a. Sub kegiatan Pengendalian OPT tanaman Perkebunan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.254.817,00,- berasal dari sisa belanja pegawai, belanja barang pakai habis, dan belanja perjalanan dinas.
- b. Sub kegiatan Penanganan Dampak Perubahan iklim (DPI) tanaman Perkebunan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 39.390.000,00,- berasal dari sisa belanja barang dan jasa berupa biaya perjalanan dinas.
- c. Sub kegiatan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Perkebunan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.899.046.931,00,- yang berasal dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa berupa honorarium pelaksana teknis kegiatan, paket pertemuan, dan perjalanan dinas bersisa sebesar Rp. 44.323.550,-;
- d. Untuk paket pekerjaan (PLTB) yang dialokasikan melalui dana APBD Murni TA.2024 semula ditargetkan seluas 117 Ha sampai akhir desember 2024 hanya dapat teralisasi seluas 27 Ha yang berasal dari program kegiatan BioCF TA.2024 yang berlokasi di desa Maribung Kecamatan Limun seluas 10 Ha dan Lokasi didesa Jangkat Kecamatan Jangkat Timur seluas 17 Ha.

Permasalahan ; Kondisi keuangan daerah Tahun 2024 mengalami Defisit Anggaran dan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Jambi No.1, No.2 dan No.9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Mekanisme Belanja APBD Tahun 2024 dan Penundaan Belanja APBD yang tidak Prioritas serta dampak dari proses Refocusing dan Pembahasan APBD-Perubahan TA. 2024 yang Lamban sehingga waktu efektif yang tersedia hanya 2 (dua) bulan untuk proses pengadaan barang dan jasa tidak dimungkinkan pelaksanaan fisik dilapangan.

Solusi yang diambil adalah perlu komitmen Bersama para pemangku kepentingan agar adanya Jaminan kepastian anggaran untuk pelaksanaan fisik dilapangan, dan perlu juga komunikasi yang baik dan jelas antara Penyedia kegiatan (untuk Penangkar bibit) dan pihak pelaksana kegiatan terkait dengan kondisi cuaca yang tidak menentu.

5) Program Perizinan Usaha Pertanian

Pada program ini dilaksanakan kegiatan rintisan sertifikasi ISPO Swadaya dan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya Kebun (STDB) dalam daerah Kabupaten/Kota serta penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis Izin Usaha Perkebunan Lintas Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp. **2.125.854.100,00,-** dan sampai akhir tahun anggaran 2024 dapat terealisasi sebesar Rp. **2.013.550.527,00,-** atau **94,72 %**. Sisa anggaran sebesar Rp. 112.303.573,00,- atau 5,28 % yang berasal dari sisa belanja operasional subkegiatan Penilaian kelayakan dan pertimbangan teknis IUP lintas Kabupaten/Kota sebesar Rp.19.772.014,00,- berupa biaya konsumsi rapat dan biaya perjalanan dinas; dan sisa belanja bahan/alat kantor, belanja Jasa kantor dan Jasa Tenaga ahli pada sub kegiatan rintisan sertifikasi ISPO Swadaya sebesar Rp. 92.531.559,00,-

Output kegiatan adalah tersedianya Sertifikat ISPO Swadaya dan STDB kebun untuk Kelompok tani Sawit rakyat, serta pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian khususnya di subsektor Perkebunan sawit.

Outcome kegiatan ini adalah untuk mendukung percepatan penyusunan Rencana aksi Daerah dalam Upaya Pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Ran-KSB) Tahun 2024 dan meningkatkan daya saing Produksi buah sawit rakyat.

Permasalahan yang terjadi, sejauh ini tidak ada masalah yang berarti yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

Solusi yang diambil adalah melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana dan target yang telah dibuat dan diupayakan melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan untukantisipasi ke depannya ada hal yang menghambat pelaksanaan.

6) Program Penyuluhan Pertanian

Tahun 2024 untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. **8.997.683.360,00-** yang merupakan subsidi dari program DBH-Sawit Tahun 2023 sebesar Rp.6.922.683.360,00,- dan program Dumisake Tahun 2024 sebesar Rp. 1.500.000.000,00,- Sampai akhir tahun 2024 penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp. **5.333.162.066,00,-** atau **59,30 %**, sisa anggaran sebesar Rp. 3.664.521.294,00 atau 40,73 % yang berasal dari sisa belanja barang dan jasa dari kegiatan berikut ini ;

- a. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.421.209.994,00,- yang berasal dari subkegiatan Deseminasi informasi Teknis, social, ekonomi dan inovasi pertanian dan subkegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan petani. Rincian sisa anggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ;
 2. Untuk subkegiatan Deseminasi informasi Teknis, social, ekonomi dan inovasi pertanian terdapat sisa belanja perjalanan dinas Biasa dan perjalanan dinas Paket Meeting dalam kota sebesar Rp. 10.165.000,00,- yakni Uang harian kegiatan fasilitasi kemitraan petani kopi dengan pelaku usaha.
 3. Untuk subkegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan petani terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.411.044.994,00,- yakni berasal dari belanja barang/jasa untuk pelaksanaan penerbitan Sertifikat ISPO Swadaya bagi 3 Kelompok tani (KUD) dan penerbitan STDB kebun Masyarakat sebanyak 4.500 persil di 4(empat) Kabupaten dalam Provinsi Jambi; dan sisa belanja Jasa tenaga administrasi sebesar Rp.18.000.000,00,- berupa honorarium 1 orang tenaga Penyuluh yang mengundurkan diri/berhenti kerja.
- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi petani Berbasis Kawasan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 215.106.600,00,- yang berasal dari sub kegiatan Pendampingan dan pengawalan Korporasi petani dan sub kegiatan Pembentukan Penguatan Kelembagaan Koorporasi petani. Rincian sisa anggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Untuk sub kegiatan Pendampingan dan pengawalan Korporasi petani terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 72.868.000.00,- yang berasal dari sisa belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota berupa kontrak paket pekerjaan Full Board Fasilitas Penguatan kelembagaan koorporasi di Kabupaten Merangin;
2. Untuk sub kegiatan Pembentukan Penguatan Kelembagaan Koorporasi petani terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 142.238.600,00,- yang berasal dari sisa dana paket pekerjaan Kemitraan petani dengan pelaku usaha yang berupa belanja bahan/alat kantor sebesar Rp. 23.031.750,00,-, belanja makan minum rapat sebesar Rp. 22.815.000,- serta dan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebesar Rp. 115.399.850,00,- Paket Kemitraan petani tidak dapat dilaksanakan karena sehubungan dengan adanya *Surat Edaran Gubernur Jambi No.1/SE/TAPD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Penundaan Belanja yang tidak Prioritas pada APBD Provinsi Jambi Tahun 2024* akibatnya anggaran kegiatan ada yang diblokir tidak dapat dicairkan tepat waktu dan dikembalikan ke Kas Daerah.

Output kegiatan ini adalah Sosialisasi dan Diseminasi terkait informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian, Pembinaan terhadap Kelembagaan Koorporasi petani, penguatan kelompok usaha jasa petani/buruh tani dan pembentukan Kemitraan petani dengan Pelaku Usaha.

Permasalahan khusus untuk kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian adalah keterlambatan terbitnya Regulasi berupa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak/Juknis) dari Pusat terkait dengan pelaksanaan bantuan program DBH-Sawit Tahun 2024 di Provinsi Jambi, selain itu juga masih lemahnya kualitas Perencanaan Penganggaran didalam merumuskan biaya untuk Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani, dan.

Solusi yang diambil adalah perlu koordinasi yang lebih intensif dengan pihak Biro Hukum dan Inspektorat wilayah Jambi terkait Regulasi pelaksanaan Bansos melalui program DBH-Sawit dan program Dumisake. Selain itu juga perlu peningkatan koordinasi dan sinkronisasi tim teknis penyelenggara kegiatan dibidang dengan tim Perencanaan Penganggaran terutama dengan Bakeuda dan Bappeda.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

- a. Ketersediaan Anggaran untuk program Prioritas yang cukup memadai
- b. Kemampuan Sumber daya Aparatur dan kualitas SDM Petani
- c. Kemampuan Kelembagaan Petani
- d. Komitmen para stakeholder
- e. Regulasi yang jelas dan berkeadilan.
- f. Peran serta masyarakat dan pihak swasta lainnya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi yang kurang sehat dan berkelanjutan.
- b. Kebijakan Pemerintah pusat dan daerah yang sering berubah.
- c. Regulasi khusus mengatur penggunaan dana Bantuan Sosial untuk dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil – Sawit (DBH-Sawit).
- d. Kualitas Sumberdaya manusia, baik pelaksana kegiatan maupun penerima manfaat kegiatan.
- e. Kondisi Cuaca dan iklim yang belum dapat dikendalikan.

2.2 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Perkebunan melalui Perubahan APBD tahun 2024 menjadi sebesar Rp **39.573.307.060,00,-** dengan rincian **Belanja Tidak Langsung Rp 13.911.595.932,00,-** dan **Belanja Langsung Rp 25.661.711.128,00,-**, mengalami penurunan sebesar **-27,10 %** bila dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 54.289.283.640,00,- Untuk Belanja Langsung tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **-6,32 %** bila dibandingkan dengan tahun 2023.

Penyerapan anggaran Belanja langsung sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp.**23.290.793.217,00,-** atau **91,04 %** dan realisasi fisik mencapai **93,22 %**. Bila dibandingkan dengan tahun 2023, maka terjadi penurunan capaian kinerja untuk Serapan anggaran sebesar -26,76 % dan realisasi fisik menurun sebesar -4,20 %.

Sedangkan belanja tidak langsung terserap sebesar Rp. **13.091.115.541,00,-** atau **94,10 %** bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat 94,36 %, maka terjadi penurunan sebesar -0,26 %.

Dana APBD dinas Perkebunan Tahun 2024 untuk Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp **25.661.711.128,00,-** dapat terealisasi sebesar Rp. **23.290.793.217,00,-** atau **91,04 %**. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp **13.911.595.932,00,-** dapat direalisasikan sebesar Rp. **13.091.115.541,00,-** atau **94,10 %**.

Sementara itu dana **APBN** dinas Perkebunan Tahun 2024 terdiri dari **dana dekonsentrasi (dekon)** dan **dana Tugas Pembantuan (TP)** total sebesar **Rp.9.570.846.000,00,-** atau meningkat cukup tinggi mencapai **107,80 %** bila dibandingkan tahun 2023 tercatat sebesar **Rp.4.605.857.411,00,-**. Peningkatan alokasi dana APBN TA. 2024 ini disebabkan adanya penambahan alokasi dana TP menjadi sebesar Rp. 8.875.246.000,00,-, dan dana dekon sebesar Rp. 695.600.000,00,-. Sampai akhir tahun 2024 dapat terserap sebesar Rp.8.310.997.168,00,- atau sebesar **86,84 %**, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 644.082.782,00,-. Atau mencapai 13,16 %.

Sisa anggaran 13,16 % meliputi dana dekon sebesar Rp. 16.583.532,00,- dan **dana TP sebesar Rp. 627.499.250,00,-**. Untuk dana Dekon sisa anggaran berasal dari sisa kontrak paket pekerjaan Penguatan perlindungan Perkebunan dan sisa perjalanan dinas pada kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya. Sedangkan untuk dana TP sisa anggaran sebesar **Rp. 559.023.000,00,-** berasal dari paket Pekerjaan Pasca panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran hasil perkebunan yang berupa kegiatan Penerbitan STDB-Kopi sebanyak 3.200 persil pada 4 (empat) Kabupaten dalam Provinsi Jambi yang hanya terealisasi sebanyak 1.040 persil atau **33,33 %**. Dan sisa anggaran sebesar Rp. 68.476.250,00,- berasal dari sisa kontrak paket pengadaan bibit Kopi pada kegiatan Pengembangan Kawasan tanaman semusim dan rempah dan sisa perjalanan dinas pada kegiatan Penguatan Perbenihan tanaman Perkebunan dan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan.

Khusus untuk sisa anggaran dana TP ada yang diblokir/direvisi oleh Kementan RI melalui Dirjenbun sebesar Rp. 615.766.000,00,- yang terdapat pada kegiatan Pengembangan Kawasan tanaman semusim dan rempah serta kegiatan Penguatan perbenihan tanaman Perkebunan yang pada akhir TA 2024 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 62.529.600,00,- berasal dari sisa kontrak pekerjaan dan perjalanan dinas. Selanjutnya sisanya sebesar Rp. 11.733.250,00,- berasal dari sisa kontrak dan perjalanan dinas kegiatan Penguatan perlindungan Perkebunan.

Pengembangan Kawasan tanaman semusim dan rempah, dan Penguatan perbenihan tanaman perkebunan.

Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagai berikut :

1. APBD Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **13.911.595.932,00,-** atau **92,74 %**;
2. APBD Belanja Langsung sebesar Rp. **25.661.711.128,00,-** atau **93,79 %**;
3. APBN Tugas Pembantuan sebesar Rp. **8.875.246.000,00,-** atau **86,84 %**;
4. Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. **695.600.000,00,-** atau **97,62 %**;

Realisasi anggaran yang dikelola Dinas Perkebunan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran belanja langsung APBD untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. **23.290.793.217,00,-** atau **91,04 %** dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. **25.661.711.128,00,-** ; bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **3,76 %** dari capaian sebesar 93,79 % di tahun 2023. Sampai akhir tahun 2024 serapan anggaran untuk program /kegiatan utama terealisasi sebesar Rp. **23.290.793.217,00,-** atau mencapai 91,04 %.
2. Anggaran Program pendukung sebesar Rp. **16.591.717.790,00,-** dan sampai akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. **15.552.778.354,00,-** atau mencapai **93,74 %**, bila dibandingkan dengan tahun 2023 hanya mencapai 89,10 % maka tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar **+4,56 %**.
3. Realisasi anggaran Belanja Langsung APBN TP Rp. 7.631.980.750,00,- atau mencapai 85,99 % dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 8.875.246.000,00,-;
4. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.091.115.541,00,- atau 94,10 % dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 13.911.595.932,00,-
5. Realisasi Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 679.016.468,00,- atau 97,62 % dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 695.600.000,00,-

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, bila pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	persentase peningkatan Produksi tanaman perkebunan	100	100,82	100,82	8.280.932.390.	7.265.526.674	87,74
2.	Meningkatnya Pendapatan Petani	Persentase Nilai Tukar Petani (NTUP-Perkebunan)	127,25	151,87	119,34	14.712.656.880.	8.890.872.199.	60,43
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Persentase peningkatan Nilai Sakip, dan IKM	100	96,99	95,65	16.591.717.790.	15.552.778.354.	93,74
Belanja langsung			-	-	-	25.661.711.128	23.290.793.217	91,04
Belanja tidak Langsung			-	-	-	13.911.595.932	13.091.115.541	94,10
Jumlah / Rata-rata			-	-	105,27	39.573.307.060	31.709.177.227	80,13

Sumber : Data Olahan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian realisasi Kinerja Sasaran tercatat **105,27 %** ini memberikan indikasi telah terjadi peningkatan sebesar **2,33 %** bila dibandingkan dengan capaian realisasi kinerja Sasaran tahun 2023 hanya tercatat **102,94 %**, Namun terhadap Capaian realisasi keuangan tahun 2024 hanya mencapai 80,13 % terjadi penurunan sebesar **-16,52 %** bila dibandingkan dengan tahun lalu 2023 tercatat 96,65 %.

Selanjutnya terkait tingkat efisiensi anggaran tahun 2024, dapat diuraikan pada tabel berikut ;

Tabel 3.5. Analisis efisiensi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman Perkebunan	Persentase peningkatan Produksi tanaman perkebunan	100,82	87,74	0,87
2.	Meningkatnya Pendapatan Petani	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTUP-Perkebunan)	119,34	60,43	0,51
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Persentase peningkatan Nilai Sakip, dan IKM	96,75	93,74	0,96

Sumber : Data Olahan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2024

Analisis Efisiensi

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, maka tingkat efisiensi kinerja sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran yang tingkat efisiensinya dibawah nilai angka 1 dapat dikategorikan **lebih efisien**, yakni ;
 - a. Indikator meningkatnya Nilai NTUP- sub sektor Perkebunan, tingkat efisiensinya sebesar **0,51** dan bila dibandingkan dengan tahun 2023 tercatat 0,83, maka dalam pencapaian sasaran meningkatnya Pendapatan petani, buruh tani dan pekerja lainnya pada tahun 2024 **lebih efisien** dibandingkan tahun 2023, hal ini terindikasi oleh Persentase capaian kinerjanya masih dibawah angka 1.
 - b. Indikator persentase Peningkatan produksi dan Produktivitas tanaman perkebunan tingkat efisiensinya sebesar **0,87**, bila dibandingkan dengan tahun 2023 tercatat 0,93, maka dapat dikategorikan **masih efisien** dalam pencapaian sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, hal ini terindikasi oleh persentase capaian kinerjanya lebih besar dari penggunaan anggaran.
2. Sasaran Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel Tingkat efisiensinya sebesar 0,96, bila dibandingkan dengan tahun 2023 tercatat 1,03, maka pencapaian sasaran ini lebih efisien, artinya Capaian kinerja sasaran sdh lebih baik.

3.6. IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKATAN PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA

Sejak tahun 2021 Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan dibawahnya tidak ada lagi, dalam hal ini Satker Kabupaten tidak diberlakukan lagi, sebagaimana yang sudah diatur didalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan dipertegas lebih rinci lagi didalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi pada Tahun 2024 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat melalui dana APBN sebesar Rp. **10.266.446.000,00,-** dalam bentuk alokasi dana Dekonsentrasi (dana **APBN-Dekon**) sebesar Rp. **695.600.000,00,-** dan dana Tugas Pembantuan (dana **APBN-TP**) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **9.570.846.000,00,-**. Sampai akhir tahun anggaran 2024 dana Dekon dapat direalisasikan sebesar Rp.679.016.468,00,- atau mencapai 97,62 % sedangkan untuk dana TP dapat terealisasi sebesar **Rp.8.310.997.168,00,-** atau capaian Kinerja sebesar **86,84 %**, atau kategori Berhasil.

Rincian Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel .3.6.1. sebagai berikut:

Tabel.3.6.1. Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
1	Dinas Perkebunan	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	0	0	0
2	Disbun Perkebunan	Penguatan Perlindungan Perkebunan	24.300.000	818.353.350	99,28
3	Dinas Perkebunan	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	113.000.000	113.000.000	100,00
4	Dinas Perkebunan	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	5.574.000.000	4.956.646.700	88,92
5	Dinas Perkebunan	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi)	1.841.300.000	1.282.277.000	69,64

		dan Pemasaran Hasil Perkebunan			
6	Dinas Perkebunan	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	522.646.000	461.703.700	88,34
Total			8.875.246.000	7.631.980.750	85,99

Sumber: Data Olahan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan tabel 3.6.1. diatas dapat dijelaskan bahwa dari total pagu APBN-TP Tahun 2024 itu, sebesar Rp. 8.875.246.000,00-, dialokasikan untuk kegiatan penunjang peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp.8.762.246.000,00,-, dan sebesar Rp. 113.000.000,00,- dialokasikan untuk kegiatan dukungan Manajemen. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mendapatkan 5 (lima) Program Pusat dari Kementerian Pertanian yang dibiaya melalui APBN-TP, yaitu ;

1. Program Dukungan Perlindungan Perkebunan.
2. Program Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya.
3. Program Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah.
4. Program Dukungan Pengolahan dan Pemasaran hasil Perkebunan.
5. Program Dukungan Perbenihan tanaman Perkebunan.

Rincian output masing-masing program dan kegiatan tersebut, meliputi ;

1. Program Dukungan Perlindungan Perkebunan, output kegiatan meliputi :
 - a. Fasilitasi operasional Brigade Proteksi tanaman perkebunan, berupa ; Pembinaan Sertifikasi desa organik berbasis komoditas perkebunan di desa Suko Pangkat Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci).
 - b. Pengendalian OPT tanaman Karet seluas 250 Ha meliputi 100 Ha di Kabupaten Bungo, dan seluas 150 Ha di Kabupaten Tebo.
2. Program Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya.
 - a. Penyusunan Perencanaan Program dan Pengelolaan keuangan asset.
 - b. Pengelolaan data informasi dan statistik perkebunan.
3. Program Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah.
 - a. Peremajaan tanaman Kopi Arabika seluas 300 Ha di Kabupaten Kerinci.
 - b. Intensifikasi tanaman Karet seluas 400 Ha pada 4 (empat Kabupaten), yakni : Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, dan Kabupaten Sarolangun.

4. Program Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran hasil Perkebunan.
 - a. Registrasi UPPB sebanyak 5 surat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tebo.
 - b. Fasilitasi pertemuan dan koordinasi penetapan harga TBS.
 - c. Pengembangan pelayanan informasi Pasar komoditas tanaman Perkebunan.
 - d. Promosi produk hasil Perkebunan berupa Pameran produk hasil Perkebunan.
 - e. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit rakyat sebanyak 3.200 STDB untuk 3(tiga) Kabupaten, yakni ; Batanghari, Sarolangun, dan Bungo.
 - f. Registrasi STDB Kopi sebanyak 3.200 persil untuk 4 Kabupaten, yakni ; Kerinci, Merangin, Tanjab Barat, dan Tanjab Timur.
 - g. Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan sebanyak 3 Kasus.
 - h. Penyediaan Sarana Pengolahan Komoditas Perkebunan.
5. Program Penguatan Perbenihan tanaman Perkebunan.
 - a. Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan sebanyak 3 rekom.
 - b. Pembangunan Kebun Sumber Benih tanaman Perkebunan berupa kebun induk kopi Libtukom, pemeliharaan kebun Entres Kopi, pemeliharaan kebun Sumber Benih Unggul Tanaman Pinang di Kab. Tanjab. Barat.

Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi pada tahun 2024, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringkali ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan, selain itu Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya

sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat menganggarkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan, serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

2. Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;
2. Terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian terkait Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang di padu serasikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dilapangan dengan proses pencairan dananya.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan kinerja Dinas Perkebunan tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD tahun 2026, maka secara umum rata-rata mencapai 99,97 persen, bila dibandingkan dengan tahun 2023 tercatat 98,29 persen maka terjadi peningkatan kinerja sebesar +1,68 persen.
2. Capaian kinerja Sasaran Strategis dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2024 diperoleh nilai sebesar **92,93 %** atau dapat dikategorikan **sangat baik** dalam **Kode Hijau Tua** dan bila dibandingkan dengan Tahun 2023 tercatat 100,64 %, maka mengalami penurunan sebesar **-7,71 persen**.
3. Capaian kinerja Program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2024 sebesar **80,13 %** dan bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **96,72 %** maka mengalami penurunan sebesar **-16,59 persen**.
4. Capaian tingkat efisiensi anggaran kegiatan Tahun 2024 dinas Perkebunan **Cukup efisien** yakni mencapai angka **0,78** , bila dibandingkan dengan tahun 2023 tercatat angka **0,93**, maka tahun 2024 pelaksanaan kegiatan lebih efisien.
5. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti ; Kebijakan Pemerintah pusat dan daerah yang sering berubah, Koordinasi dan Sinkronisasi yang kurang sehat dan berkelanjutan, Keterbatasan Sumberdaya manusia, baik pelaksana kegiatan maupun penerima manfaat kegiatan, dan Kondisi Cuaca dan iklim berupa kemarau Panjang dan banjir yang belum dapat dikendalikan.

4.2. Rekomendasi

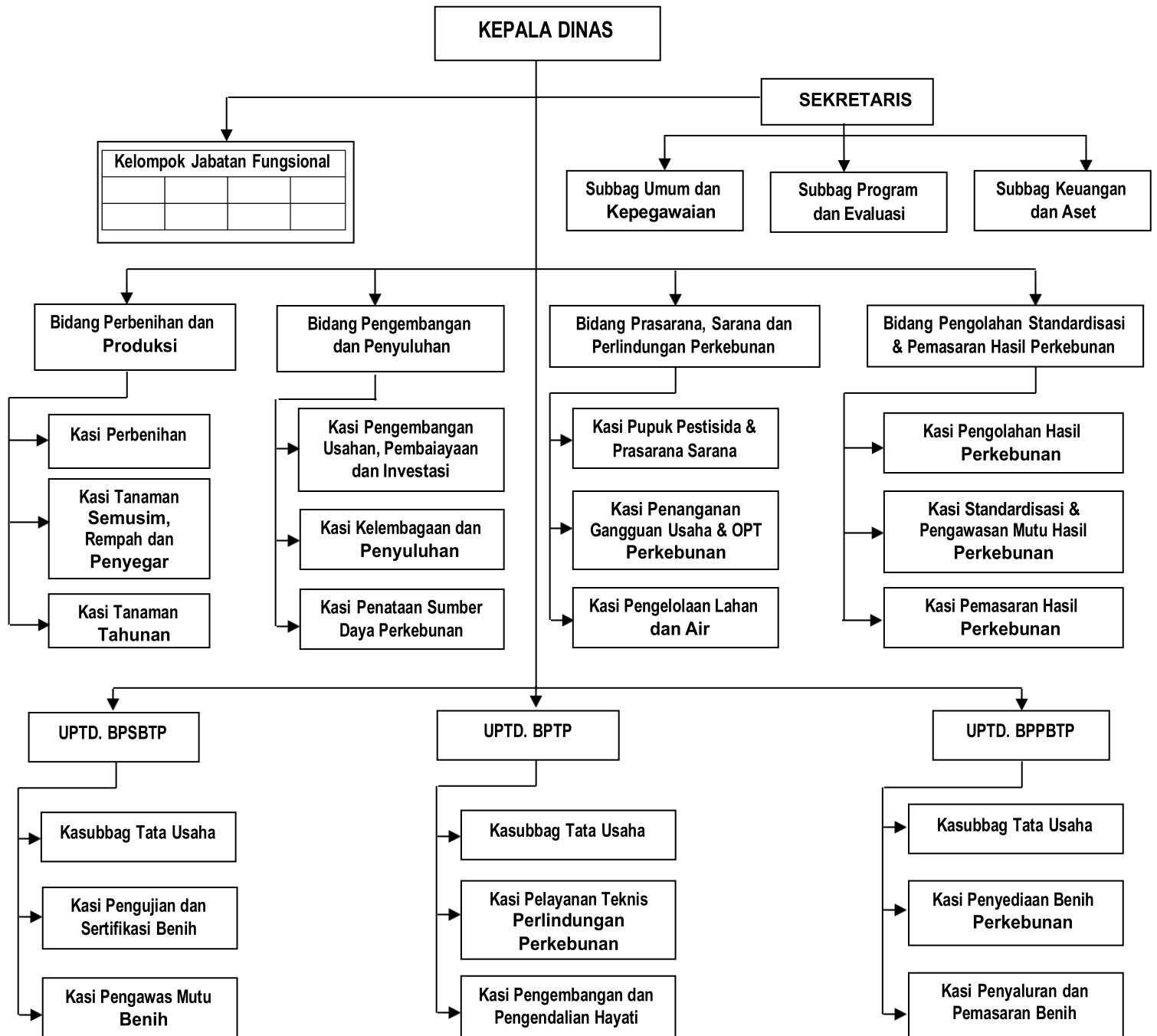
Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi terkait perencanaan dan penganggaran antara pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan pemerintah Kabupaten.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspective*.
3. Sangat diperlukan adanya Komitmen Bersama terhadap implementasi Sasaran dan Target yang telah ditetapkan didalam Rencana kerja.

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Disbun
2. Matrik Renstra Perubahan 2021-2026
3. PK- Kadis Perkebunan TA. 2024
4. Tanggapan/Tindak Lanjut LHE – AKIP TA.2023.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI**





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PERKEBUNAN

Jalan M. Yusuf Singadikane No.1 Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 62596, Fax (0741) 60561 Website: www.disbun.jambiprov.go.id

Jambi, 19 Juni 2024

Nomor : S- 1178 /DISBUN-1.2/VI/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hasil LHE-AKIP Th. 2023

Kepada
Yth. Sdr. Inspektur Provinsi Jambi

Di-

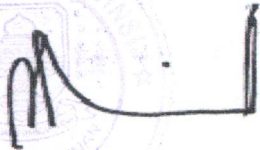
J a m b i

Menindak lanjuti Surat Saudara Nomor : LAP-700/137/ITPROV-4/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2023, maka izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Terima kasih kami sampaikan atas penetapan **hasil penilaian AKIP Tahun 2023** dengan capaian nilai **70,45** atau predikat “ **BB** “, yang secara umum variabel *implementasi* atau *pemanfaatan* pada komponen pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal terhadap Kinerja Tahun 2023 Dinas Perkebunan ke depan *masih dapat dioptimalkan*.
2. Terkait dengan Rekomendasi untuk poin (4,5, dan 6) yang Saudara sampaikan didalam LHE-AKIP tahun 2023, akan menjadi perhatian kami.

Demikian kami sampaikan, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,


Ir. H. AGUSRIZAL, MM

Pembina Utama Madya
NIP.19640819 198503 1 007

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Jambi sebagai laporan,-
2. Peringgal,-

LAPORAN TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

OBJEK EVALUASI : HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023
 NOMOR LHE : LAP.700/137/ITPROV-4/ VI /2024
 TANGGAL LHE : 13 Juni 2024
 DINAS/KANTOR/BADAN/BIRO : DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

No	Uraian Rekomendasi	Hasil Tindak lanjut	Kode TL			Keterangan
			SS	BS	BT	
1	Agar membuat SK Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;	SK tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2023 dan SK tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sudah ada, namun belum dipublikasikan.	✓			(Terlampir SK Ttim Tahun 2023) dan Tahun 2024
2	Agar mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.	Penggunaan aplikasi untuk mengupload data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah dilakukan, namun petugas yang ditunjuk sering terlambat menyampaikan hasil penginputan data kinerja, disebabkan oleh selain sering terjadi Gangguan Signal pada alat Silver juga lemahnya koordinasi dan sinkronisasi data dari masing-masing Bidang teknis.	✓			Surat Kepala Dinas No.S-38/Disbun-1.2/12024 tgl 5 Januari 2024 tentang Penyampaian Evaluasi Renja Triwulan IV / 2023.
3	Agar Perjanjian Kinerja (PK) pejabat Eselon II, II, IV dan Staf Pelaksana yang disusun dan diformalkan paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan;	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 untuk seluruh pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sudah mengacu kepada PermenPAN-RB.RI Nomor 89 tahun 2021, dengan indikatornya yang SMART, PK dibuat selaras dengan data Critis Succes Faktor (CSF) dan Cascading Kinerja Dinas Perkebunan serta telah di-Unggah pada aplikasi e-SAKIP Reviu pada laman website esr.menpan.go.id .	✓			(Terlampir PK pegawai Disbun Tahun 2024).
4	Agar melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi dan Evaluasi Renja Triwulan 1,2,3,4 dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja/ bidang dengan mengetahui pimpinan OPD yang disertai dengan Jadwal evaluasi dan membuat notulensi rapat mempedomani Pergub No.30 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas;	Untuk Tahun 2024 ini akan disusun Jadwal Monev Rencana Aksi dan Monev Renja secara berkala untuk masing-masing bidang dengan berpedoman pada Pergub No. 30 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas.			✓	
5	Agar mengoptimalkan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja, serta perbaikan dan peningkatan kinerja;	Kedepan akan disajikan terkait dengan Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Rencana perbaikan/rekomendasi untuk peningkatan kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Monev rencana kerja triwulan 1,2,3,4.		✓	✓	

6	Agar dokumen Laporan Kinerja menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya yang ada dalam mencapai kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan; dan		✓		✓	
7	Agar Perjanjian Kinerja Eselon II memperhatikan Sasaran Strategis pada Perangkat Daerah yang berorientasi hasil, sesuai dengan Level jabatannya, dan indikator kinerja yang cukup untuk mengukur sasaran kinerjanya;	Laporan Kinerja yang disusun didalam Buku LKj Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2023 telah menginformasikan terkait Efisiensi atas penggunaan sumber daya Anggaran sebagaimana yang tertuang didalam Tabel.3.5. Analisis efisiensi Dinas Perkebunan Tahun 2023 pada Bab. III, namun Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja belum disajikan didalam dokumen Laporan. Tahun 2024 akan menjadi perhatian kami.				
		Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Perkebunan tetap memperhatikan Sasaran Strategis dan indikator kinerja yang berorientasi hasil, namun penajiannya belum maksimal untuk diselaraskan pada substansi Revisi Renstra Dinas Perkebunan yang sudah diverifikasi oleh tim Verifikator Renstra OPD Provinsi Jambi.	✓	✓		Bukti terlampir PK Eselon II yang sudah diselaraskan

Jambi, 19 Juni 2024
 Kepala Dinas,

 H. AGUS RIZAL, MM
 NIP. 19640819 198503 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. H. AGUSRIZAL, MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

Jabatan : **Gubernur Jambi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Jambi, Januari 2023

Pihak Pertama,

Ir. H. AGUSRIZAL, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19640819 198503 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman Perkebunan		
a.	Luas Tanamam Perkebunan	Luasan Kelapa Sawit (Ha) Luasan Kayu Manis (Ha) Luasan Kopi (Ha)	1.100.719 390 20
b.	Produksi Tanamam Perkebunan	Produksi Kelapa Sawit (Ton)	2.320.625
c.	Produktivitas Tanaman Perkebunan	- Jumlah Cakupan Pengendalian OPT Perkebunan (Ha) - Produktivitas Karet (Kg/Ha) - Produktivitas Kelapa(Kg/Ha)	125 900 1.200
2.	Meningkatnya Pendapatan Petani, buruh tani dan pekerja lainnya.	a. Jumlah buruh tani yang dibantu (Orang) b. Jumlah bantuan sarana prasarana pengolahan pasca panen yang disalurkan c. Nilai Tukar Petani Subsektor Perkebunan	500 27 Unit 125,04
3.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	- Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) - Nilai SAKIP	88,00 BB (72,00)

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 16.265.282.227	APBD
2.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 14.082.293.686	APBD
3.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 7.578.091.858	APBD

	Program		Anggaran	Keterangan
4.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	10.225.139.933	APBD
5.	Perizinan Usaha Pertanian	Rp	625.000.000	APBD
6.	Penyuluhan Pertanian	Rp	5.795.435.000	APBD

Gubernur Jambi,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Jambi,

Ir. H. AGUSRIZAL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640819 198503 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. H. AGUSRIZAL, MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

Jabatan : **Gubernur Jambi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

d.t.o

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Jambi, Januari 2024

Pihak Pertama,

Ir. H. AGUSRIZAL, MM

Pembina Utama Madya

NIP.19640819 198503 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	A (88,00)
		Nilai SAKIP	BB (73,00)
2.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan : a. Luas Tanaman Perkebunan	Luas Kelapa Sawit (Ha)	1.106.222
		Luas Kayu Manis (Ha)	46.966
		Luas Kopi (Ha)	31.006
	b. Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Kelapa Sawit (Ton)	2.332.223
	c. Produktivitas Tanaman Perkebunan	- Jumlah cakupan Pengendalian OPT Perkebunan (Ha)	125
		- Produktivitas Karet (Kg/Ha)	900
		- Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)	1.200
3.	Meningkatnya Pendapatan Petani, buruh tani dan pekerja lainnya.	Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Perkebunan	127,25

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 16.864.526.117	APBD
2.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 7.197.100.490	APBD
3.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 632.091.900	APBD

	Program		Anggaran	Keterangan
4.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	4.476.291.920	APBD
5.	Perizinan Usaha Pertanian	Rp	8.232.537.460	APBD
6.	Penyuluhan Pertanian	Rp	2.903.000.000	APBD

Gubernur Jambi,

d.t.o

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

**Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Jambi,**



Ir. H. AGUSRIZAL, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19640819 198503 1 007

**Tabel.16. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan
Provinsi Jambi Tahun 2021-2026
(Revisi Tahun 2023)**

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	27				NON URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				17,987,060,220		21,576,919,647		21,640,147,130		22,780,803,861		23,995,448,273		25,441,725,210		133,422,104,342	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	60,08 (B)	65,00 (B)	17,801,060,220	67,00 (B)	21,390,919,647	69,00 (B)	15,459,471,159	71,00 (BB)	16,848,026,117	73,00 (BB)	17,360,275,173	75,00 (BB)	18,279,584,422	75,00 (BB)	107,139,336,739	
						Skor IKM	81.00	83.00		85.00		85.00		87.00		88.00		88.00		88.00		88.00
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	9 Dokumen	9 Dokumen	357,351,578	9 Dokumen	616,689,473	9 Dokumen	507,620,500	9 Dokumen	637,140,000	9 Dokumen	456,477,450	9 Dokumen	530,596,813	45 Dokumen	3,105,875,813	
				01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKT, Statistik Perkebunan	6 Dokumen	6 Dokumen	179,486,000	6 Dokumen	224,357,500	6 Dokumen	280,290,500	6 Dokumen	303,590,000	6 Dokumen	256,477,450	6 Dokumen	320,596,813	6 Dokumen	1,564,798,263	
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Buku RKA-Disbun	20 Buku	-	- 30 Buku	15,000,000	0	-	0	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	15,000,000		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Buku RKAP-Disbun	20 Buku	-	- 30 Buku	20,000,000	0	-	0	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	20,000,000		
				04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Buku DPA-Disbun	20 Buku	-	- 30 Buku	15,000,000	0	-	0	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	15,000,000		
				05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Buku DPAP-Disbun	20 Buku	-	- 30 Buku	15,000,000	0	-	0	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	15,000,000		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan (LPPK, LKj, LKPJ, LPPD)	5 Laporan	-	- 5 Laporan	150,000,000	0	-	0	-	5 Laporan	-	5 Laporan	-	5 Laporan	150,000,000		
				07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan Evaluasi Renja, Renstra, SPIP, Monev Kegiatan.	3 Laporan	3 Dokumen	177,865,578	3 Dokumen	222,331,973	3 Laporan	227,330,000	3 Laporan	333,550,000	3 Laporan	200,000,000	3 Laporan	210,000,000	3 Laporan	1,371,077,551	
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Akuntansi dan Keuangan	5 Laporan	5 Laporan	15,721,978,899	5 Laporan	16,508,077,844	5 Laporan	12,824,311,204	3 Laporan	14,612,944,659	5 Laporan	15,245,545,892	5 Laporan	16,007,823,187		90,920,681,684	
				01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Periode Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	15,350,132,649	14 bulan	16,117,639,281	108 Org/14 Bln	12,398,182,287	108 Org/14 Bln	14,192,424,659	108 Org/14 Bln	14,902,045,892	108 Org/14 Bln	15,647,148,187	108 Org/14 Bln	88,607,572,955	
				02	Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Jumlah layanan administrasi pengelolaan keuangan	48 Orang	50 orang	267,470,750	50 orang	280,844,288	2 Dokumen	328,466,417	2 Dokumen	350,520,000	2 Dokumen	270,000,000	2 Dokumen	283,500,000	2 Dokumen	1,780,801,455	
				04	Koordinasi danPelaksanaan AkutansiSKPD	Jumlah dokumen penggajian laporan akuntansi dan keuangan yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	104,375,500	3 Dokumen	109,594,275	3 Dokumen	97,662,500	3 Dokumen	70,000,000	3 Dokumen	73,500,000	3 Dokumen	77,175,000	3 Dokumen	532,307,275	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab					
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
3	27	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Aset Barang Milik Daerah	3 Laporan		-	3 Laporan	183,800,000	3 Laporan	192,990,000	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	376,790,000					
3	27	01	1.03		02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah kendaraan operasional Roda Empat yang diasuransikan	0	-	-	14 unit	93,800,000	1 Laporan	98,490,000	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	192,290,000			
						Jumlah gedung kantor yang diasuransikan (Telanaipura)	0	-	-	-	4 unit	40,000,000	1 Laporan	42,000,000	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	82,000,000			
				06	Penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan aaset barang milik daerah (BMD)	0	-	-	3 Dokumen	50,000,000	3 Laporan	52,500,000	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	102,500,000		
3	27	01	1.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Kepegawaian	3 Laporan	3 Laporan	103,969,200	3 Laporan	624,450,000	3 Laporan	142,499,950	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	870,919,150					
					02	Pengadaan Pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	165 Stel	165 steel	76,969,200	165 steel	98,000,000	165 Stel	119,999,950	0	-	165 Stel	-	165 Stel	-	165 Stel	-	294,969,150	
					04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem informasi Kepegawaian	Jumlah Tenaga Fungsional Tertentu	0	0	-	50 orang	3,600,000,000	0	-	0	-	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	4,100,000,000		
					09	Pendidikan dan Pelatihan ASN	Jumlah ASN yang dilatih	20 Orang	20 Orang	27,000,000	120 Orang	526,450,000	20 Orang	22,500,000	0	-	20 Orang	-	20 Orang	-	20 Orang	-	575,950,000	
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Kegiatan Rutinitas Kantor	5 Laporan	7 Laporan	474,047,073	7 Laporan	871,423,350	7 Laporan	713,329,365	7 Laporan	576,308,169	7 Laporan	585,536,878	7 Laporan	614,813,722		3,835,458,556				
					01	Penyediaan Kompenen instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah kompenen instalasi listrik	6 Jenis	6 Jenis	17,430,000	6 Jenis	26,100,000	6 Paket	95,499,324	6 Paket	21,756,200	6 Paket	22,844,010	6 Paket	23,986,211	6 Paket	207,615,745		
					02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis ATK	48 Jenis	48 Jenis	136,730,040	48 Jenis	219,253,750	48 Paket	147,814,835	48 Paket	107,564,636	48 Paket	112,942,868	48 Paket	118,590,011	48 Paket	842,896,140		
					03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis ART	24 Jenis	24 Jenis	63,798,583	24 Jenis	83,033,200	24 Paket	72,819,348	24 Paket	84,000,000	24 Paket	88,200,000	24 Paket	92,610,000	24 Paket	484,461,131		
					06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	3.900 eks	3.900 eks	10,958,450	3.900 eks	21,120,000	2 Paket	16,785,000	2 Paket	11,000,000	2 Paket	11,550,000	2 Paket	12,127,500	2 Paket	83,540,950		
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi	925 OK	925 OK	245,130,000	950 OK	521,916,400	12 Laporan	380,410,858	12 Laporan	351,987,333	12 Laporan	350,000,000	12 Laporan	367,500,000	12 Laporan	2,216,944,591		
3	27	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	3 Jenis	2 Jenis	274,823,220	5 Jenis	1,412,637,581	3 Jenis	173,258,900	3 Jenis	41,426,393	3 Jenis	43,497,713	3 Jenis	45,672,598		1,991,316,405				
					01	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	3 Unit	0	-	25 Unit	980,000,000	25 Unit	-	25 Unit	-	25 Unit	-	25 Unit	-	25 Unit	-	980,000,000	
					05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur	0	6 Jenis	172,007,220	6 Jenis	180,607,581	6 Paket	173,258,900	6 Paket	41,426,393	6 Paket	43,497,713	6 Paket	45,672,598	6 Paket	656,470,405		
					06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Software dan Hardware	30 Unit	8 Unit	102,816,000	20 Unit	252,030,000	10 Unit	-	0	-	10 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	-	354,846,000	
3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat dan Jasa Komunikasi SDA, dan Listrik	4 Jenis	4 Jenis	372,990,000	4 Jenis	507,155,400	4 Jenis	385,767,690	4 Jenis	421,196,896	4 Jenis	442,256,741	4 Jenis	464,369,578		2,593,736,305				
					01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	1155 surat	500 surat	39,348,000	500 surat	41,315,400	1 Laporan	29,800,000	1 Laporan	29,996,896	1 Laporan	31,496,741	1 Laporan	33,071,578	1 Laporan	205,028,615		
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagehan Rekening	3 Jenis	3 jenis	333,642,000	3 jenis	465,840,000	1 Laporan	355,967,690	1 Laporan	391,200,000	1 Laporan	410,760,000	1 Laporan	431,298,000	1 Laporan	2,388,707,690		
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	46 Unit	88 Unit	495,900,250	96 Unit	666,686,000	96 Unit	519,693,550	96 Unit	559,010,000	96 Unit	586,960,500	96 Unit	616,308,525		3,444,558,825				
					01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	46 Unit	53 Unit	360,060,250	61 Unit	255,000,000	61 Unit	420,903,550	61 Unit	460,000,000	61 Unit	483,000,000	61 Unit	507,150,000		2,486,113,800		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab					
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
			06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	27 Unit	27 unit	87,320,000	27 unit	91,686,000	27 Unit	98,790,000	27 Unit	99,010,000	27 unit	103,960,500	27 unit	109,158,525	589,925,025					
			09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung yang direhab	7 Unit	8 unit	48,520,000	8 unit	320,000,000	0	-	0	-	8 unit	-		368,520,000						
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																				
								36,069,949,695				38,880,404,397				23,845,940,870			18,160,081,760		25,344,307,319		151,552,810,877	
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan Sarana Pertanian yang sesuai Peruntukan Kabupaten/ Kota.	10.0	15.0	5,182,420,790	15.0	24,309,818,036	17.0	10,085,831,002	17.0	7,602,020,490	18.0	4,649,648,500	19.0	7,874,275,208	19.0	59,832,209,308				
3	27	02	1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Sebaran Peredaran Sarana Pertanian/Perkebunan	11 kab/kota	11 kab/kota	170,000,000	11 kab/kota	321,500,000	11 kab/kota	159,128,760	11 kab/kota	153,050,000	11 kab/kota	170,000,000	11 kab/kota	188,000,000		1,161,678,760				
			01	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Jumlah Sebaran Peredaran Pupuk, Pestisida, dan Sarana Pendukung Pertanian/Perkebunan	11 Laporan	11 Laporan	60,000,000	11 Laporan	195,000,000	11 Laporan	52,000,000	11 Laporan	71,000,000	11 Laporan	75,000,000	11 Laporan	78,750,000	11 Laporan	531,750,000				
			02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	2 dokumen	2 dokumen	110,000,000	2 dokumen	126,500,000	2 dokumen	107,128,760	2 dokumen	82,050,000	2 dokumen	95,000,000	2 dokumen	109,250,000	2 dokumen	629,928,760				
			03	Pengawasan Sebaran Sarana Pasca panen Perkebunan	Jumlah pengawasan Ketersedian dan sebaran sarana Pasca panen Perkebunan.	0	0	-	0	-	0	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan		1 Laporan					
			04	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan Ketersedian dan sebaran sarana Pengolahan hasil Perkebunan.	0	0	-	0	-	0	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan		1 Laporan					
3	27	02	1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Komoditi Unggulan Lokal Perkebunan bersertifikat	4 Komoditi	3 Komoditi	4,876,220,790	6 Komoditi	22,493,348,171	6 Komoditi	9,645,770,626	6 Komoditi	7,320,775,208	6 Komoditi	4,179,648,500	6 Komoditi	7,341,275,208	6 Komoditi	55,857,038,503				
				01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	350 Sertifikat	385 Sertifikat	300,000,000	425 Sertifikat	350,000,000	425 Sertifikat	409,189,048	425 Sertifikat	410,000,000	425 Sertifikat	429,648,500	425 Sertifikat	430,500,000	1100 Sertifikat	2,329,337,548			
			05	Pengawasan Mutu, dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	4 Laporan	11 Laporan	4,576,220,790	14 Laporan	22,143,348,171	14 Laporan	9,236,581,578	14 Laporan	6,910,775,208	14 Laporan	3,750,000,000	14 Laporan	6,910,775,208	16 Laporan	53,527,700,955				
			06	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan berbentuk Anakan.	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan berbentuk Anakan.																			
			08	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan berbentuk Mata Tumbuh.	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan berbentuk Mata Tumbuh.																			
			10	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan berbentuk Stek.	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan berbentuk Stek.																			
			11	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan berbentuk Biji.	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan berbentuk Biji.																			
			12	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan berbentuk Batang.	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan berbentuk Batang.								-	-	100.000 btg	2,500,000,000	100.000 btg	2,500,000,000	200.000 btg	5,000,000,000				

[illegible]

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab		
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas areal Pengendalian OPT perkebunan dan penanganan Bencana pertanian	15.0	18.0	971,683,679	19.0	4,621,554,413	20.0	11,862,529,362	21.0	4,476,291,920	22.0	4,904,000,000	23.0	8,830,000,000	23.0	35,666,059,374	
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Cakupan Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	971,683,679	9 Kab/Kota	4,621,554,413	9 Kab/Kota	11,862,529,362	9 Kab/Kota	4,476,291,920	9 Kab/Kota	4,904,000,000	9 Kab/Kota	8,830,000,000		35,666,059,374	
				01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura,dan Perkebunan yang dikendalikan (Demplot)	50 Ha	25 Ha	257,194,679	125 Ha	270,054,413	175 Ha	446,758,012	175 Ha	393,166,920	175 Ha	354,000,000	175 Ha	355,000,000	625 Ha	2,076,174,024	
				02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. (BioCF-ISFL)	Jumlah Area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani.	0	0	-	100 Ha	3,250,000,000	0	-	100 Ha	75,000,000	200 Ha	75,000,000	200 Ha	4,000,000,000	950 Ha	7,400,000,000	
				03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan UsahaTanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan. (BioCF-ISFL)	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan UsahaTanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan.	0	100 Ha	714,489,000	100 Ha	651,500,000	403 Ha	11,415,771,350	400 Ha	4,008,125,000	450 Ha	4,475,000,000	450 Ha	4,475,000,000	1.847 Ha	25,739,885,350	
				05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam bidang Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. (BioCF-ISFL)	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam bidang Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.	0	-	-	4 Laporan	450,000,000	0	-	4 Laporan	-	4 Laporan	-	4 Laporan	-	4 Laporan	450,000,000	
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelengkapan dokumen Perizinan Perusahaan Perkebunan	60	100	50,000,000	100	350,000,000	100	625,000,000	100	2,137,854,100	100	150,000,000	100	257,500,000	100	3,570,354,100	
3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang Memenuhi Standar Operasional/Ketentuan yang berlaku	6 PT	18 PT	50,000,000	18 PT	350,000,000	18 PT	625,000,000	18 PT	2,137,854,100	18 PT	150,000,000	18 PT	257,500,000	108 PT	3,570,354,100	
				01	Penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian	Standar pelayanan Publik pemberian izin usaha pertanian	0	0	-	3 dokumen	100,000,000	0	-	2 dokumen	-	0	-	3 dokumen	100,000,000	6 Dokumen	200,000,000	
				02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pertimbangan Teknis izin usaha pertanian di Lintas kabupaten/Kota	3 Dokumen	0	-	5 Dokumen	150,000,000	0	-	5 Dokumen	137,854,100	5 Dokumen	150,000,000	5 Dokumen	157,500,000	25 Dokumen	595,354,100	
				05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	2 Laporan	50,000,000	3 Laporan	100,000,000	3 Laporan	625,000,000	3 Laporan	2,000,000,000	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	2,775,000,000	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase ketersediaan SDM dan Kelembagaan yang mapan.	2.6	3.0	977,199,123.00	3.0	3,226,427,886.15	3.0	4,444,673,515.00	3.0	8,997,683,360.00	3.0	1,911,750,000.00	3.0	1,333,114,688.00	15.0	20,890,848,572.15		
3	27	07	1.01	Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian	Jumlah tenaga Penyuluh PerkebunanTerampil	20 Orang	0	-	28 Orang	200,000,000	38 Orang	58,555,880	50 Orang	-	70 Orang	75,000,000	90 Orang	75,000,000	90 Org	408,555,880		
				01	Pengembangan kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh pertanian yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Diklat.	8 Orang	0	-	8 orang	100,000,000	0	-	8 orang	-	10 orang	-	10 orang	-	10 orang	100,000,000	
				02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	0	0	-	20 Orang	100,000,000	20 Orang	58,555,880	20 Orang	-	20 orang	75,000,000	20 orang	75,000,000	80 orang	308,555,880	
				03	Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang ditingkatkan Kapasitasnya.	0	0	-	0	-	0	-									
				04	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian.	Jumlah Penyuluh Pertanian yang tersedia dan ditingkatkan Kapasitasnya.	0	0	-	0	-	0	-									
3	27	07	1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Wilayah Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan		4 kab/kota	977,199,123.00	4 kab/kota	2,601,427,886.15	4 kab/kota	1,145,880,000.00	4 kab/kota	6,997,683,360.00	4 kab/kota	906,750,000.00	4 kab/kota	832,687,500.00	4 kab/kota	13,461,627,869		
				01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	0	1 Dokumen	136,200,083	4 Dokumen	551,610,336.15	4 Dokumen	1,145,880,000	4 Dokumen	75,000,000	4 Dokumen	78,750,000	4 Dokumen	82,687,500	16 Dokumen	2,070,127,919	
				02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompokptani yang mendapat Prnyuluhan dan Pemberdayaan.	1 Poktan	2 Poktan	840,999,040	5 Poktan	2,049,817,550	0	-	5 Poktan	6,922,683,360	5 Poktan	828,000,000	5 Poktan	750,000,000	25 Poktan	11,391,499,950	
3	27	07	1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Mapan.		3 Poktan	-	6 Poktan	425,000,000	8 Poktan	3,240,237,635	8 Poktan	2,000,000,000	8 Poktan	930,000,000	8 Poktan	425,427,188	41 Poktan	7,020,664,823		
				02	Pendampingan Manajem Koorporasi Petani.	Jumlah pendampingan Manajemen Koorporasi Petani.	0	0	-	2 Laporan	425,000,000	0	-	2 Laporan	500,000,000	1 Laporan	-	1 Laporan	425,427,188	6 Poktan	1,350,427,188	
				05	Pendampingan dan Pengawalan Korporasi Petani.	Jumlah Korporasi petani yang didampingi.	0	0	-	0	-	0	-			1 Laporan	280,000,000					
				06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi	0	3 unit	27,394,000	4 unit	1,023,800,000	6 Unit	3,240,237,635	4 unit	1,500,000,000	4 unit	650,000,000	4 unit	650,000,000	32 unit	7,091,431,635	
				TOTAL PAGU				26,924,991,774		57,460,869,342		54,339,875,556		40,693,966,987		35,520,356,934		43,623,891,741		258,692,147,616		

CATATAN

- Acuan Penyusunan RENSTRA
- 1 Data Capaian kinerja indikator 2tahun sebelumnya (2021-2022)
 - 2 Evaluasi kesesuaian RPJMD 2021-2026 dan Rencana Revisi RPJMD 2021-2026
 - 3 Sinkronisasi dengan Tupoksi masing-masing bidang/UPTD
 - 4 Sinkronisasi dengan Musrenbang desa, Forum SKPD, Prov Jambi, Rakortek Lingkup Disbun Tahun 2023
 - 5 Kesesuaian dengan mengacu regulasi Permendagri 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - 6 Kesesuaian dengan mengacu pada Regulasi Kemendagri 050/5889 Tahun 2021 tgl.27 Desember 2021, Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Jambi, 19 Agustus 2023

KEPALA DINAS,



Ir. H. AGUSRIZAL, MM
Pembina Utama Muda
NIP.196408191985031007